

**ANALISIS PENGARUH DAU, DAK, PAD, PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL**

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota

Di Pulau Sumatera)



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Sekar Arum Pawestri

NIM : 10 312 433

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2014

ANALISIS PENGARUH DAU, DAK, PAD, PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL

(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota

Di Pulau Sumatera)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Sekar Arum Pawestri
NIM : 10 312 433

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2014**

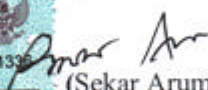
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Maret 2014

Penyusun




(Sekar Arum Pawestri)

ANALISIS PENGARUH DAU, DAK, PAD, PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota
Di Pulau Sumatera)



Hasil Penelitian

Diajukan oleh :

Nama : Sekar Arum Pawestri
NIM : 10 312 433

المعتمد الاسلامي
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 24 Maret 2014

Dosen Pembimbing,

Muqodim, Drs., M.B.A., Ak

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh DAU, DAK, PAD, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Disusun Oleh : **Sekar Arum Pawestri**
Nomor Mahasiswa : **10312433**

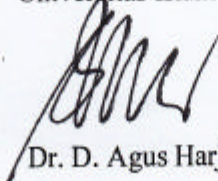
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 30 Mei 2014

Penguji/ Pembimbing Skripsi: **Muqodim, Drs., M.B.A., Ak., CA**

Penguji : **Fitriati Akmila, S.E., M.Com.**

الجامعة الإسلامية
الاستدراك

Mengetahui
Pjs. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia


Dr. D. Agus Harjito, M.Si



H a l a m a n M o t t o

“Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan”.

(Al insyirah: 5,6)

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”.

(Confusius)

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”.

(Aristoteles)

“Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu”.

(William Feather)

“Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(Al-Baqarah: 282)

H a l a m a n p e r s e m b a h a n

Karya kecil ini ku persembahkan untuk:

Alm Ayahanda dan Ibunda tercinta

Yang telah memperkenalkan pelangi kehidupan

Adikku tersayang

Yang senantiasa tersenyum untuk kebahagiaanku

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang ditujukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik bersifat bimbingan, petunjuk maupun kesempatan berdiskusi. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ijin penelitian.
2. Bapak Muqodim, Drs., M.B.A., Ak, selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran membimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Suharto, S.E, Msi, yang dengan sabar menerima keluh kesah dan memberikan nasehat serta bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Alm Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungannya dalam segala hal.
5. Adikku tercinta: Bunga yang selalu menyemangati dengan tingkah lucu dan senyumannya.
6. Seluruh Karyawan bagian perpustakaan Badan Pusat Statistik Yogyakarta yang telah membantu dalam mencari data.

7. Keluarga besar Bapak Suparno yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dan merasa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini berguna dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalammu'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 02 April 2014

(Sekar Arum Pawestri)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Berita Acara Ujian Skripsi	v
Hal Persembahan	vi
Motto	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstraksi	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II.....	9
KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penganggaran Sektor Publik	9

2.2	Belanja Modal.....	10
2.3	Dana Alokasi Umum.....	12
2.4	Dana Alokasi Khusus	15
2.5	Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.6	Pertumbuhan Ekonomi.....	22
2.7	Penelitian Terdahulu	26
2.8	Hipotesis Penelitian.....	28
2.8.1	Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.....	28
2.8.2	Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.....	29
2.8.3	Pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.....	30
2.8.4	Pengaruh Antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.....	32
2.9	Kerangka Berfikir	33
BAB III.....		35
METODE PENELITIAN		35
3.1	Populasi dan Sampel.....	35
3.2	Metode Pengumpulan Data	36
3.3	Jenis dan Sumber Data	36
3.4	Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	36
3.4.1	Variabel Dependen	37
3.4.2	Variabel Independen	37
3.4.2.1	Dana alokasi Umum.....	37
3.4.2.2	Dana Alokasi Khusus	38
3.4.2.3	Pendapatan Asli Daerah.....	38
3.4.2.4	Pertumbuhan Ekonomi.....	39
3.5	Metode Analisis Data	39
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	40
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	40

3.5.2.1	Uji Normalitas	40
3.5.2.2	Uji Multikolinearitas	41
3.5.2.3	Uji Autokorelasi.....	41
3.5.2.4	Uji Heteroskedastisitas	42
3.5.3	Analisis Regresi Berganda.....	42
3.5.4	Uji Hipotesis	43
3.5.4.1	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	43
3.5.4.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	43
3.5.4.3	Uji Koefisien Determinasi (R ²)	44
3.5.5	Hipotesis Operasional	44
3.5.6	Pembahasan Hasil Uji Hipotesis	45
BAB IV.....		46
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		46
4.1	Analisis Statistik Deskriptif	47
4.2	Uji Asumsi Klasik	50
4.2.1	Uji Normalitas	51
4.2.2	Uji Multikolinieritas.....	52
4.2.3	Uji Heteroskedastisitas	53
4.2.4	Uji Autokorelasi	54
4.3	Analisis Regresi Linier Berganda	55
4.4	Uji Hipotesis	57
4.4.1	Uji Statistik T	57
4.4.2	Uji F	59
4.4.3	Uji Koefisien Determinasi	60
4.5	Pembahasan Variabel-Variabel Penelitian.....	61
4.5.1	Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal.....	61
4.5.2	Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal.....	63

4.5.3	Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal.....	64
4.5.4	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.....	65
BAB V.....		67
KESIMPULAN DAN SARAN.....		67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Keterbatasan Penelitian	68
5.3	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....		69

DAFTAR TABEL

4.1 Distribusi Sampel	46
4.2 Tabel Daerah	47
4.2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	48
4.3. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	52
4.4. Hasil Uji Multikolinieritas	53
4.5. Hasil Uji Autokorelasi	55
4.6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	55
4.7. Hasil Pengujian Hipotesis	57
4.8. Hasil Uji F	59
4.9. Hasil Uji Koefisien Determinasi	60
5.0 Kesimpulan	66

DAFTAR GAMBAR

2.1. Model Kerangka Pemikiran Penelitian	34
4.1. Hasil Uji Normalitas	51
4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Kabupaten/Kota	72
Lampiran 2. Data Variabel Penelitian.....	74
Lampiran 3. Data PDRB Tahun 2007-2012.....	90
Lampiran 4. Uji Statistik Deskriptif.....	94
Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik.....	95
Lampiran 6. Analisis Regresi Berganda.....	97
Lampiran 7. Uji Hipotesis	98

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh DAU, DAK, PAD, dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. Variabel dependen yaitu belanja modal. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah DAU, DAK, PAD, dan pertumbuhan ekonomi.

Populasi pada penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera pada tahun 2008-2012. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi APBD. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Total sampel yang diperoleh adalah 68 kabupaten dan kota di Pulau Sumatera selama 5 tahun yaitu 2008-2012.

Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK, PAD, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.

Kata kunci : Belanja Modal, DAU, DAK, PAD, Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

Fiscal decentralization provides an opportunity for local governments to optimize the potential of the region to improve the welfare of society. This research aims to examine the effect of DAU, DAK, PAD, and economic growth on capital expenditures. Dependent variable is capital expenditures and independent variable are DAU, DAK, PAD, and economic growth.

The population in this research is the counties and cities on the island of Sumatra in 2008-2012. The data used are secondary data obtained from the budget realization report (APBD). The sampling method using purposive sampling to obtain samples in accordance with predetermined criteria. The total sample is 68 counties and cities in Sumatra for 5 years is 2008-2012.

Analysis of the data used multiple linear regression. The results of analysis showed that the DAK, PAD, and economic growth significant positive effect on capital expenditures. But DAU significant negative effect on capital expenditures.

Keywords: Capital expenditures, DAU, DAK, PAD, Economic Growth.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi tahun 1998 memberikan dampak yang besar dalam bidang Pemerintahan yakni perubahan struktur pemerintahan, dari sentralisasi menuju desentralisasi. Perubahan tersebut diwujudkan dengan berlakunya UU No 22 Tahun 1999, dan UU No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Otonomi daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antar daerah. Otonomi daerah pada hakekatnya dapat memberikan peluang untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu Daerah untuk lebih maju tanpa ada otorisasi terlebih dahulu dari Pusat. Otonomi daerah juga memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk membangun daerahnya dengan lebih baik lagi. Dengan otonomi daerah diharapkan Pemerintah dapat mandiri, dan tidak tergantung dengan Pemerintah Pusat dalam segala hal, khususnya dalam hal pembiayaan, maupun pengelolaan keuangan.

Dalam perkembangannya UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999 diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan

menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Semua dana perimbangan tersebut disalurkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu perlu pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut.

Transfer dana yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu dana perimbangan yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan penyelarasan dengan urusan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) menjelaskan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) mengemukakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja modal. Penelitian lain yang dilakukan oleh Prakosa (2004) menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat.

Dana perimbangan selanjutnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus. DAK akan cenderung

menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Penelitian terkait DAK dilakukan oleh Situngkir (2009) dalam Nuarisa (2013) mengemukakan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang serupa dilakukan oleh Nuarisa (2013) menjelaskan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal.

UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 menjadikan landasan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Daerah sangat diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan memberikan dampak yang positif untuk masyarakat, di antaranya Pemerintah dapat memberikan pelayanan publik dilihat dari pembangunan daerah, infrastruktur yang baik, dan produktivitas perekonomian yang tinggi.

Pemerintah daerah diharuskan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dengan memberikan proporsi belanja daerah khususnya belanja modal. Pemanfaatan yang baik dan tepat sasaran akan memberikan dampak yang baik pula.

Pengalokasian terhadap dana yang diterima Pemerintah Daerah sebaiknya digunakan untuk kepentingan publik. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Namun sebaliknya, jika pemanfaatan yang tidak tepat seperti

penganggaran yang lemah akan menimbulkan kecurangan yang sering disebut dengan underfinancing dan overfinancing yang memungkinkan tingkat efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah.

Adanya perubahan struktur pemerintahan menjadi desentralisasi berdampak pada pemberian kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya UU tentang Otonomi Daerah menimbulkan adanya kesenjangan ekonomi antar daerah. Hal ini akibat dari potensi masing-masing daerah yang berbeda, pertumbuhan ekonomipun berbeda-beda masing-masing daerah.

Pertumbuhan ekonomi antar daerah yang berbeda bisa disebabkan dari luas wilayah yang berbeda, kebijakan pemerintah yang berbeda juga satu daerah dengan daerah lain, sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang juga berbeda.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan suatu daerah, kemampuan suatu daerah dalam menyediakan kebutuhan barang dan jasa kepada masyarakat, melakukan pelayanan publik yang menunjang produktivitas masyarakat, menimbulkan pendapatan perkapita yang tinggi, dengan semakin banyak produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang nantinya akan

menarik investor untuk menanamkan modalnya, sehingga belanja modal yang dikeluarkan akan semakin besar diimbangi pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tinggi dan luas, serta mengakibatkan PAD meningkat.

Menurut (Mardiasmo, 2002 dalam Adi, 2006) menyebutkan semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

Beberapa penelitian terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa DAU berhubungan dengan belanja modal, belanja modal berhubungan dengan pendapatan per kapita, PAD berhubungan dengan pendapatan perkapita, DAU berhubungan dengan PAD.

Penelitian lain dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap PABM, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap PABM.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Pradita (2013) mengemukakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian yang lain dilakukan oleh Nuarisa (2013) menjelaskan bahwa PAD, DAU dan DAK secara parsial berpengaruh positif terhadap PABM.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nuarisa (2013) dengan objek penelitiannya adalah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dan data-data yang digunakan adalah dokumen Laporan Realisasi APBD tahun 2011. Perbedaan penelitian ini adalah penambahan satu variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, objek penelitian di Pulau Sumatera dan data-data yang digunakan yaitu Laporan Realisasi APBD tahun 2008-2012.

Penambahan variabel berdasarkan saran dari penelitian yang dilakukan Pradita (2013) dan Nuarisa (2013) serta melihat lambannya perkembangan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi-potensi yang besar dan belum digali secara optimal. Pemilihan objek penelitian di Pulau Sumatera karena daerah-daerah yang ada di Pulau Sumatera memenuhi kriteria khusus pada pemberian DAK, terbukti sering terjadinya bencana alam. Selain itu karena daerahnya mempunyai sumber daya alam yang cukup potensial dibanding daerah lain.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul “ANALISIS PENGARUH DAU, DAK, PAD, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal?

2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh DAU terhadap belanja modal.
2. Untuk menguji pengaruh DAK terhadap belanja modal.
3. Untuk menguji pengaruh PAD terhadap belanja modal.
4. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, berguna untuk memberikan masukan dalam hal perumusan kebijakan dan implementasi dari kebijakan tersebut yang tentunya dibuat dan dilaksanakan untuk tujuan pelayanan publik.
2. Bagi Peneliti, berguna sebagai acuan dan tambahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, serta untuk tambahan informasi dan wawasan untuk menemukan hal-hal yang baru dalam kaitannya dengan keuangan daerah, khususnya pada PAD, DAU, DAK, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan ditulis dalam lima bab yang masing – masing bab terdiri dari beberapa sub bab, seperti di bawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel, sumber data, identifikasi variabel penelitian, metode analisis data, dan kriteria penerimaan hipotesis penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan analisis data, temuan empiris yang diperoleh dalam penelitian ini, hasil pengujian hipotesis dan interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti sejenis berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penganggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan rencana jangka pendek yang dinyatakan dalam bentuk keuangan. Anggaran dalam sektor publik dinyatakan dalam APBN dan APBD yang menggambarkan rencana keuangan dimasa yang akan datang (Mahmudi, 2011). Tujuan dari penganggaran adalah sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya publik yang diwujudkan dalam PAD, melakukan distribusi ekonomi yang diwujudkan dalam transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yaitu DAU dan DAK, dan menciptakan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik melalui kebijakan fiskal sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer, yang terdiri dari DAU, dan DAK. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi yang termasuk dalam struktur APBD adalah pendapatan daerah yang dicerminkan dengan PAD, pendapatan transfer

yang dicerminkan dengan DAU dan DAK, serta belanja daerah yang dicerminkan dengan belanja modal.

2.2 Belanja Modal

Menurut Kepmendagri No.29/2002 dijelaskan bahwa belanja dibagi tiga kelompok yaitu Belanja Administrasi Umum (BAU), Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP), dan Belanja Modal (BM). Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan investasi atau menambah aset yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Modal yang ada digunakan dalam peningkatan pertumbuhan.

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian pembangunan/ pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 belanja modal termasuk dalam kelompok belanja langsung. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan

dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat dan sesuai dengan perkembangan yang ada guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan yang lebih baik.

2.3 Dana Alokasi Umum

Menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum yang kemudian disingkat menjadi (DAU) adalah salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Alokasi DAU suatu daerah ditentukan atas dasar :

1. Besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*).
2. 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN.
3. Alokasi dasar yang ditentukan dari gaji PNS.

Pendapatan Dalam Negeri (PDN) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia sebagai

dana pembangunan. PDN *Netto* merupakan hasil penjumlahan dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak yang dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH).

Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan DAU.
2. Untuk Daerah Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan DAU.

Penghitungan DAU dilakukan dengan menggunakan formulasi DAU sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. DAU suatu daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah selisih dari kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum. Sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan DBH.

Celah fiskal daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal dihitung berdasarkan perkalian antara masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pertumbuhan manusia, dan indeks produk domestik regional bruto.

Kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari PAD dan DBH. DAU atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot celah fiskal masing-masing daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan jumlah keseluruhan DAU daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan DAU atas dasar alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah, termasuk peningkatan gaji pokok, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, pemberian gaji ke-13.

DAU untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Jumlah DAU masing-masing provinsi/kabupaten/kota besarnya tidak sama dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat dengan leluasa menggunakan dana tersebut untuk lebih bisa memberikan pelayanan publik yang baik dan mengesampingkan keperluan yang tidak penting baik untuk dirinya sendiri maupun kelompok tertentu.

Pemerintah Pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dan mengoptimalkannya sehingga tidak semata-mata hanya mengandalkan DAU. Sejalan dengan hal tersebut Prakosa (2004) mengemukakan bahwa pemerintah daerah hanya mengandalkan transferan DAU. Hal tersebut

menimbulkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana DAU dari pemerintah pusat.

Besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dapat dilihat dari Pemerintah Daerah masih mengharapkan kucuran dana atau transferan dana dari Pemerintah pusat. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan dengan maksimal karena pengeluaran daerah belum dapat dibiayai sendiri.

Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) mengemukakan bahwa ada keterkaitan antara transfer dana dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah di dominasi oleh jumlah DAU daripada PAD (Sidik et al, 2002 dalam Pradita, 2013).

Setiap transfer DAU yang diterima pemerintah daerah diwujudkan dalam belanja modal, maka pemerintah daerah cenderung membuat rencana daerah dalam skala besar dan rencana belanja modal cenderung dalam skala besar agar pemerintah daerah mendapatkan transfer DAU dari pemerintah pusat lebih besar.

2.4 Dana Alokasi Khusus

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, terutama untuk membantu membiayai kebutuhan saran dan prasarana pelayanan dasar masyarakat atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Pemerintah menetapkan kriteria untuk daerah-daerah yang mendapatkan alokasi DAK. Kriteria tersebut yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD.

Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah yang meliputi daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah terpencil/ tertinggal. Daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk daerah ketahanan pangan.

Kriteria teknis ditetapkan oleh Kementerian Negara/departemen teknis dengan indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana atau prasarana pada masing-masing bidang atau kegiatan yang akan didanai oleh DAK. Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Dana Pendamping dianggarkan dalam APBD. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

Bidang-bidang yang didanai dengan DAK menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 yakni bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur yang meliputi jalan, irigasi, dan air bersih, bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, bidang prasarana pemerintah daerah, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang sarana dan prasarana pedesaan, bidang perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004, pemerintah kabupaten/kota berwenang dan bertanggungjawab untuk menyediakan layanan umum yang luas pada hampir semua bidang kehidupan masyarakat.

Alokasi DAK diprioritaskan untuk:

1. Membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang merupakan urusan daerah.
2. Menghindari tumpang tindih kegiatan yang didanai dari dana alokasi khusus dengan kegiatan yang didanai dari anggaran kementerian /lembaga.
3. Mengalihkan kegiatan-kegiatan yang didanai dari dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang telah menjadi urusan daerah secara bertahap ke DAK.
4. Mengurangi jumlah penduduk miskin, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan di daerah.
5. Memberikan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan kepulauan, perbatasan daerah dengan negara lain, daerah tertinggal atau terpencil, serta termasuk daerah ketahanan pangan.

Pemanfaatan yang baik terhadap DAK yang diterima oleh pemerintah daerah akan cenderung menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. DAK yang diperoleh digunakan untuk program nasional yang merupakan belanja modal juga, seperti program pendidikan untuk daerah terpencil dan tertinggal berupa sarana dan prasarana yang diwujudkan

dengan pembuatan rumah singgah, perpustakaan. Jadi semakin tinggi DAK yang diterima pemerintah daerah maka belanja modal juga meningkat.

2.5 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai Undang-Undang No.33 Tahun 2004 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. PAD bersumber dari 4 (empat) komponen yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Pajak Daerah (HPD)

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas:

a. Pajak provinsi, antara lain :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran

3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Objek atau Jenis Retribusi Daerah menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan .

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum seperti pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan dan persampahan, penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pelayanan air bersih, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta yang dibuat Pemerintah Daerah, pengujian kapal perikanan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Adapun yang termasuk dalam jasa usaha adalah pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, pelayanan terminal, pelayanan tempat khusus parkir, pelayanan tempat penitipan anak, penginapan/villa, penyedotan kakus, rumah potong hewan, tempat penyandaran kapal, tempat rekreasi dan olah raga, penyebrangan di atas air, pengelolaan air limbah, penjualan usaha produksi daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan adalah retribusi atas kegiatan tertentu oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan. Perizinan tertentu yang retribusinya dipungut yaitu izin peruntukan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek, dan izin pengambilan hasil hutan.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba perusahaan daerah air minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi kepada pihak ketiga, dividen atau bagian laba yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah dan penjualan saham milik daerah (BUMD).

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Hasil usaha daerah lain dan sah adalah Pendapatan Asli daerah (PAD) yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi dan perusahaan daerah (BUMD). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak terpisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

Fungsi Pendapatan Asli Daerah

1. Sebagai faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah.
2. Merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut.

Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung dari bagaimana pemerintah daerah merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi yang dapat menambah penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik akan berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah. Infrastruktur yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemerintah Daerah tersebut. Daerah yang memiliki PAD yang tinggi maka memiliki sumber dana untuk menyelenggarakan pemerintahan, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan untuk masyarakat akan semakin baik (Adi,2006). Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan dampak terhadap alokasi belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

2.6 Pertumbuhan Ekonomi

Dengan bergulirnya reformasi 1998 di Indonesia, lahirlah peraturan tentang otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan dalam rangka

desentralisasi fiskal, dengan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana mencakup pula sumber daya manusia. Dengan adanya otonomi daerah bisa sangat memungkinkan setiap daerah berkembang dan tumbuh dengan berbeda dan beragam satu dengan yang lainnya. Sehingga berbeda pula pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

Menurut Todaro (1998), pertumbuhan ekonomi terdiri dari tiga faktor atau tiga komponen yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product (GDP)*. Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Prof. Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai “kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya”.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan ekonomi yang dihitung dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. PDRB dapat berasal dari seluruh barang/jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun. PDRB merupakan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, baik yang

dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya.

PDRB bisa dikatakan sebagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. PDRB dihitung dari nilai tambah yang dihasilkan dari sektor-sektor perekonomian daerah yakni pertanian, perikanan, dan kelautan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel, dan restoran, angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa- jasa.

Pertumbuhan ekonomi secara nasional diartikan sebagai kenaikan GDP. Hasil perhitungannya berupa persentase yang dapat dihitung dengan rumus (Hakim, 2002) sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = (\text{PDRBt}-\text{PDRBt-1})/(\text{PDRBt-1})\times 100\%$$

Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara regional diartikan sebagai kenaikan PDRB atau selisih dari PDRB pada harga konstan tahun sekarang dengan PDRB tahun sebelumnya. Hasil perhitungannya berupa nominal yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi} = \text{PDRBt}-\text{PDRBt-1}$$

Pertumbuhan ekonomi dilihat dari munculnya sarana dan prasarana yang semakin maju, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, mengembangkan jaminan sosial. Hal tersebut akibat dari pengalokasian belanja modal secara efektif dan efisien sehingga muncul fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak untuk publik.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan berdampak pada pengeluaran belanja modal yang lebih besar. Pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang menyangkut perkembangan fiskal yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar. Semakin meningkatnya pembangunan daerah, maka semakin besar pula kebutuhan akan dana yang harus dihimpun oleh Pemerintah Daerah.

Samuelson (1995) menyatakan bahwa ada 4 faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Faktor sumber daya manusia.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana sumber daya manusia memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

2. Faktor sumber daya alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu pada sumber daya alam dalam melaksanakan proses perkembangannya. Sumber daya alam yang dimaksud adalah kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

3. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat mendorong percepatan proses pembangunan, penerapan atau penggunaan alat-alat modern dan canggih akan berdampak pada efisiensi, kualitas, dan kuantitas dari serangkaian

proses pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4. Faktor sumber daya modal

Sumber daya modal digunakan untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai belanja modal telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, sehingga penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), objek penelitian yang diambil adalah kabupaten dan kota se Jawa-Bali. Variabel independen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Dari penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yustikasari (2007) dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. sedangkan PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap PABM.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), objek penelitian yang diambil adalah kabupaten dan kota se Jawa-Bali. Variabel-variabel terkait dengan penelitian tersebut adalah DAU, belanja modal, PAD, pendapatan per kapita. Alat analisis yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Modeling), dan analisis jalur. Dari penelitian yang dilakukan Harianto dan Adi (2007) dapat disimpulkan bahwa DAU berhubungan dengan belanja

modal, belanja modal berhubungan dengan pendapatan per kapita, PAD berhubungan dengan pendapatan per kapita, DAU berhubungan dengan PAD.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putro (2009), objek penelitian yang diambil adalah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Variabel independen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Dari penelitian yang dilakukan oleh Putro (2009) dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan PAD tidak berpengaruh terhadap PABM, sedangkan DAU berpengaruh terhadap PABM.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yovita (2011), objek penelitian yang diambil adalah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Variabel independen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Dari penelitian yang dilakukan oleh Yovita (2011) dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi dan DAU berpengaruh terhadap PABM, sedangkan PAD tidak berpengaruh terhadap PABM.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pradita (2013), objek penelitian yang diambil adalah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Variabel yang digunakan adalah PAD dan DAU. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2013), objek penelitian yang diambil adalah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Variabel independen yang digunakan adalah PAD, DAU, dan DAK. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Dari penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap PABM.

2.8 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.8.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat.

Di era otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki hak penuh untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi daerah dan sumber daya yang dimiliki. Pendanaan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Setiap transfer DAU yang diterima pemerintah daerah diwujudkan dalam belanja modal, maka Pemerintah Daerah cenderung membuat rencana daerah dalam skala besar dan rencana belanja modal cenderung dalam skala besar agar pemerintah daerah mendapatkan transfer DAU dari pemerintah pusat lebih besar. Transfer DAU dalam jumlah besar menyebabkan kenaikan jumlah pengeluaran belanja modal, begitu juga sebaliknya jika transfer DAU dalam jumlah kecil menyebabkan penurunan jumlah pengeluaran belanja modal.

Abdullah dan Halim (2003) menjelaskan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) mengemukakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja modal.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004) menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hal tersebut akan mengakibatkan pemerintah daerah menunggu transferan dana dari pemerintah pusat, sehingga belanja modal yang dikeluarkan sangat bergantung pada sumber penerimaan tersebut.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Putro (2009), Yovita (2011), dan Nuarisa (2013) menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap PABM. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pradita (2013) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H1: DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal.

2.8.2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

DAK merupakan salah satu dana perimbangan yang digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang berasal dari APBN. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal,

karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Pemberian DAK masing-masing daerah besarannya berbeda tergantung pada daerah yang memenuhi kriteria khusus. DAK dengan kriteria khusus lebih diperuntukkan pada daerah-daerah yang rawan bencana seperti banjir, longsor, gempa, daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah pesisir dan kepulauan. Besaran DAK pada daerah khusus tersebut akan lebih besar dibanding daerah tanpa kriteria khusus.

Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan yang menjadi prioritas daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani, 2011 dalam Nuarisa, 2013). DAK yang besar akan berdampak pada alokasi belanja modal yang besar pula, diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur yang memadai untuk publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009) dalam Nuarisa (2013) menjelaskan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap PABM. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) menyebutkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap PABM. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H2: DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal.

2.8.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD terdiri dari pajak, restribusi, dan lain sebagainya.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan publik.

Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya. Pengadaan infrastruktur atau sarana prasana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada meningkatnya produktivitas masyarakat dan maraknya investor yang membuka peluang usaha, dengan demikian akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wong (2004) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur industri akan berdampak pada meningkatnya pajak daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah.

Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi atau kontribusi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002 dalam Putro, 2009)

Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sejalan dengan hasil penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007), penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) menunjukkan hasil bahwa PAD

berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut hipotesisnya sebagai berikut:

H3: PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.8.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat yang diwujudkan dalam pemberian pelayanan publik yang memadai melalui alokasi belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi yang baik didukung dengan pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur diperoleh dari alokasi belanja modal yang dianggarkan dalam APBD. Jika pertumbuhan ekonomi daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun untuk melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana yang menguntungkan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan untuk meningkatkan PDRB. Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik.

Pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh 4 (empat) faktor, salah satu faktornya adalah sumber daya modal. Sumber daya modal digunakan untuk mengolah sumber daya alam yang ada. Diberlakukannya otonomi daerah diharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih bebas dalam mengelola keuangan daerah yang dimiliki dan lebih efektif dalam mengatur sumber daya alam yang ada.

Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat mendorong adanya investasi sehingga investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan daerah, maka semakin besar pula belanja modal yang dikeluarkan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Yovita (2011) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis nya sebagai berikut:

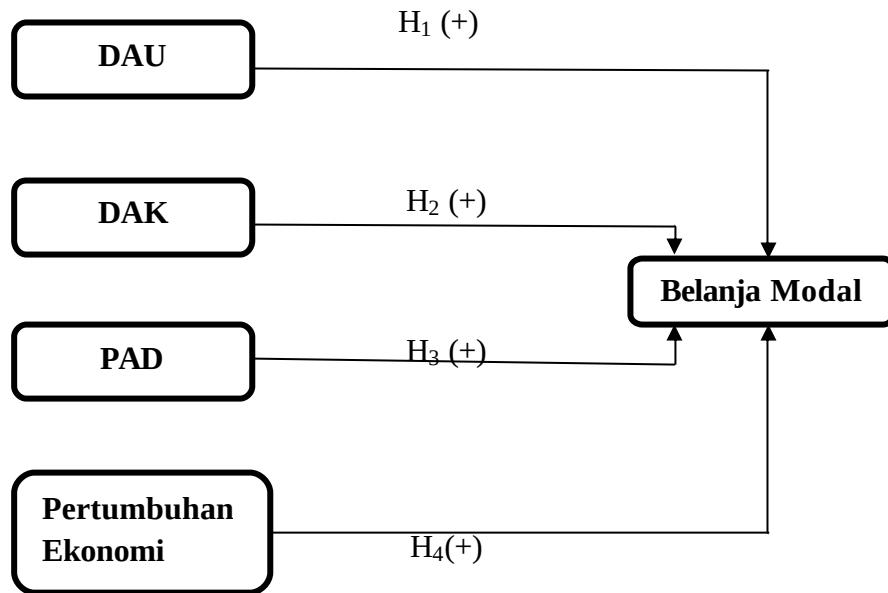
H4 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal.

2.9 Kerangka Berfikir

Berdasarkan kajian pustaka dan hipotesis yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat digambarkan dalam skema kerangka berpikir yang ditunjukkan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera, yang terdiri dari 10 Provinsi dan 119 kabupaten serta 34 kota. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 143 kabupaten dan kota (www.depkeu.djpk.go.id).

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *non random sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Salah satu teknik pengambilan sampling yang termasuk dalam *non random sampling* adalah *purposive sampling*.

Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan melakukan pendekatan melalui metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian atau masalah penelitian yang digunakan (Sekaran, 2006).

Dalam penelitian ini kriteria yang harus dipenuhi adalah :

1. Daerah kabupaten dan kota yang mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten dari tahun 2008-2012.
2. Pemerintah Daerah kabupaten dan kota yang tidak dimekarkan pada kurun waktu 2008-2012.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode tinjauan literatur, yaitu dokumentasi dari tinjauan menyeluruh terhadap karya publikasi dan non publikasi dari sumber sekunder (Sekaran, 2006).

Langkah-langkah tinjauan literatur adalah:

3. Mengidentifikasi berbagai bahan publikasi dan non publikasi yang tersedia.
4. Mengumpulkan informasi yang relevan, melalui pencarian bahan dipergustakaan atau mengakses ke sumber online.
5. Menulis tinjauan literatur.

(Sekaran, 2006)

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2008 – 2012 yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet.

Dari Laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, DAU, DAK, PAD. Untuk data pertumbuhan ekonomi menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2007-2012 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.4 Definisi Operasional Variabel Dan Pengukurannya

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya adalah belanja

modal dan variabel independennya terdiri dari DAU, DAK, PAD, dan pertumbuhan ekonomi.

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset (aset tetap) yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Kep Mendagri No. 29/2002). Indikator variabel ini diukur dengan :

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

Belanja modal kemudian diubah ke dalam bentuk logaritma natural, agar data yang didapat tidak terlalu besar. Sehingga variabel ini diukur dengan:

$$\text{Belanja modal} = \ln \text{BM}$$

3.4.2 Variabel Independen

3.4.2.1 Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah salah satu transfer dana Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU didasarkan untuk daerah otonom yaitu provinsi dan kabupaten/kota yang besarnya ditetapkan sebesar 26% dari PDN netto yang ditetapkan dalam APBN (UU No.33 Tahun 2004).

Perhitungan DAU dijelaskan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana,

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Data DAU diperoleh dari data realisasi DAU yang ada dalam Laporan Realisasi APBD. DAU kemudian diubah ke dalam bentuk logaritma natural, agar data yang didapat tidak terlalu besar. Sehingga variabel ini diukur dengan:

$$\text{DAU} = \ln \text{DAU}$$

3.4.2.2 Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004).

Data DAK diperoleh dari data realisasi DAK yang ada dalam Laporan Realisasi APBD. DAK kemudian diubah ke dalam bentuk logaritma natural, agar data yang didapat tidak terlalu besar. Sehingga variabel ini diukur dengan:

$$\text{DAK} = \ln \text{DAK}$$

3.4.2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan (UU No.33 Tahun 2004).

PAD terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Hasil Retribusi Daerah (HRD), Pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (PPKD) dan lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS).

PAD dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{HRD} + \text{PPKD} + \text{LPS}$$

Data PAD diperoleh dari data realisasi PAD yang ada dalam Laporan Realisasi APBD. PAD kemudian diubah ke dalam bentuk logaritma natural, agar data yang didapat tidak terlalu besar. Sehingga variabel ini diukur dengan:

$$\text{PAD} = \ln \text{PAD}$$

3.4.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP). Pertumbuhan ekonomi dihitung dari selisih nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya (Hakim, 2002). Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}$$

Data PDRB diperoleh dari data yang diunduh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan ekonomi kemudian diubah ke dalam bentuk logaritma natural, agar data yang didapat tidak terlalu besar. Sehingga variabel ini diukur dengan:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \ln \text{PE}$$

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Data yang terkumpul akan diolah dengan menggunakan program SPSS 17.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data. Statistik deskriptif memberikan data rata-rata, maksimal, minimal, dan standar deviasi untuk mendeskripsikan variabel penelitian (Widarjono, 2007).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas (Widarjono, 2007). Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi data yang normal atau tidak (Widarjono, 2007). Dalam penelitian ini digunakan dua cara untuk melakukan uji normalitas data, yaitu analisis grafik dan analisis statistik.

1. Analisis Grafik

Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik normal plot.

Dasar pengambilan keputusannya adalah (Widarjono, 2007):

- a. Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan atau mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Analisis Statistik

Selain menggunakan grafik, penelitian ini juga menggunakan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*. Dasar pengambilan keputusan pada analisis *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* adalah (Widarjono, 2007):

- a. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- b. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linier diantara variabel-variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Gejala multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance*-nya kurang dari 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih dari 10 (Widarjono, 2007).

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Untuk mendeteksi masalah autokorelasi dalam persamaan regresi adalah menggunakan uji yang dapat

dilakukan dengan menghitung nilai Durbin watson (Dw). Nilai Dw yang baik berada di antara -2 hingga +2 (Widarjono, 2007).

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat penyebaran data. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Widarjono,2007).

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Widarjono, 2007). Model yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap belanja modal dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\text{Ln BM} = a + \beta_1 \text{LnDAU} + \beta_2 \text{LnDAK} + \beta_3 \text{LnPAD} + \beta_4 \text{LnPE} + E$$

Keterangan :

LnBM : Belanja Modal

LnDAU : DAU

LnDAK : DAK

LnPAD : PAD

LnPE : Pertumbuhan Ekonomi

a : Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$: Koefisien Regresi

E : Error

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parameter Individual)

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Hal ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan tabel pada *level of significant* 5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut (Widarjono, 2007) :

P value > 5%, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

P value < 5%, artinya ada pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan

membandingkan F hitung dengan F tabel pada *level of significant 5%* dengan kriteria pengujian sebagai berikut (Widarjono, 2007) :

P value > 5%, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

P value < 5%, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi berarti semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien determinasi berarti semakin kecil kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dan sebaliknya.

Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *adjusted R Square* bukan *R Square* dari model regresi karena *R Square* bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan *adjusted R Square* dapat naik turun jika suatu variabel independen ditambahkan dalam model (Widarjono, 2007).

3.5.5 Hipotesis Operasional

Hipotesis 1 dapat dinyatakan sebagai berikut:

H_0 : $\beta_1 = 0$: DAU tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

H_a : $\beta_1 \neq 0$: DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Hipotesis 2 dapat dinyatakan sebagai berikut:

$H_{02} : \beta_2 = 0$: DAK tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$: DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Hipotesis 3 dapat dinyatakan sebagai berikut:

$H_{03} : \beta_3 = 0$: PAD tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

$H_{a3} : \beta_3 \neq 0$: PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Hipotesis 4 dapat dinyatakan sebagai berikut:

$H_{04} : \beta_4 = 0$: Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

$H_{a4} : \beta_4 \neq 0$: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

3.5.6 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

Dalam pembahasan hasil uji hipotesis akan dilakukan analisis dengan cara menbandingkan hasil-hasil penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya serta konsep-konsep dan teori yang relevan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menjelaskan proses penentuan jumlah sampel. Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*, sampel penelitian yang terpilih sebanyak 68 kabupaten dan kota. Sampel yang terpilih selanjutnya digunakan untuk analisis data dan pengujian hipotesis. Distribusi sampel dapat dilihat pengambilan sampel berikut ini :

Tabel 4.1
Distribusi Sampel

No	Keterangan	Jumlah Kabupaten dan Kota
1.	Kabupaten dan kota di Pulau Sumatera.	143
2.	Daerah kabupaten dan kota yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten dari tahun 2008-2012.	(65)
3.	Pemerintah Daerah kabupaten dan kota yang tidak dimekarkan pada kurun waktu 2008-2012.	(10)
4.	Jumlah sampel.	68

Sumber: www.depkeu.djpk.go.id

Dengan sampel sebanyak 68 kabupaten/kota dengan data selama 5 (lima) tahun, maka jumlah data (N) sebanyak 340. Data sampel penelitian dapat dilihat di lampiran 1.

Sepuluh Pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak dimekarkan dalam kurun waktu 2008 – 2012 dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2

Tabel Daerah

No	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Nias Utara
2.	Kab. Nias Barat
3.	Kab. Gunung Sitoli
4.	Kab. Labuhan Batu Utara
5.	Kab. Labuhan Batu Selatan
6.	Kota Sungai Penuh
7.	Kab. Pringsewu
8.	Kab. Pesawaran
9.	Kab. Mesuji
10.	Kab. Tulang Bawang Barat

Sumber: www.depkeu.djpk.go.id

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif dilihat menggunakan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi (Widarjono, 2007).

Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LnBM	340	23.72	27.68	255.095	.58148
LnDAU	340	24.41	31.27	265.276	.47737
LnDAK	340	22.25	27.05	243.704	.46998
LnPAD	340	21.08	27.77	239.034	.83524
LnPE	340	22.92	28.71	251.295	.99544
Valid N (listwise)	340				

Sumber : Data Output SPSS diolah

Dari hasil analisis deskriptif pada tabel diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Variabel belanja modal ditunjukkan dengan LnBM, terdiri dari 340 jumlah data kabupaten dan kota di Pulau Sumatera dari tahun 2008-2012 (N). Nilai minimum belanja modal sebesar 23.72 adalah kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2008, sedangkan nilai maksimum belanja modal sebesar 27.68 adalah kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2012. Nilai minimum dan nilai maksimun tersebut mencerminkan adanya kesenjangan atau variasi yang kecil dari variabel terendah dan tertinggi. Nilai rata-rata belanja modal tahun 2008-2012 adalah sebesar 25.5095 dengan standar deviasi sebesar 0.58148, mencerminkan tingkat kesalahan atau standar error dari variabel ini adalah sebesar 0.58148 dari rata-rata.

2. Variabel DAU ditunjukkan dengan LnDAU, terdiri dari 340 jumlah data kabupaten dan kota di Pulau Sumatera dari tahun 2008-2012 (N). Nilai minimum DAU sebesar 24.41 adalah kabupaten Muara Enim pada tahun 2009, sedangkan nilai maksimum DAU sebesar 31.27 adalah kabupaten Bireuen pada tahun 2008. Nilai minimum dan nilai maksimum tersebut mencerminkan adanya kesenjangan atau variasi yang kecil dari variabel terendah dan tertinggi. Nilai rata-rata DAU tahun 2008-2012 adalah sebesar 26.5276 dengan standar deviasi sebesar 0.47737, mencerminkan tingkat kesalahan atau standar error dari variabel ini adalah sebesar 0.47737 dari rata-rata.
3. Variabel DAK ditunjukkan dengan LnDAK, terdiri dari 340 jumlah data kabupaten dan kota di Pulau Sumatera dari tahun 2008-2012 (N). Nilai minimum DAK sebesar 22.25 adalah kabupaten Empat Lawang pada tahun 2008, sedangkan nilai maksimum DAK sebesar 27.05 adalah kabupaten Bungo pada tahun 2010. Nilai minimum dan nilai maksimum tersebut mencerminkan adanya kesenjangan atau variasi yang kecil dari variabel terendah dan tertinggi. Nilai rata-rata DAK tahun 2008-2012 adalah sebesar 24.3704 dengan standar deviasi sebesar 0.46998, mencerminkan tingkat kesalahan atau standar error dari variabel ini adalah sebesar 0.46998 dari rata-rata.
4. Variabel PAD ditunjukkan dengan LnPAD, terdiri dari 340 jumlah data kabupaten dan kota di Pulau Sumatera dari tahun 2008-2012 (N). Nilai minimum PAD sebesar 21.08 adalah kabupaten Lima Puluh Kota,

sedangkan nilai maksimum PAD sebesar 27.77 adalah Kota Medan. Nilai minimum dan nilai maksimum tersebut mencerminkan adanya kesenjangan atau variasi yang kecil dari variabel terendah dan tertinggi. Nilai rata-rata PAD tahun 2008-2012 adalah sebesar 23.9034 dengan standar deviasi sebesar 0.83524, mencerminkan tingkat kesalahan atau standar error dari variabel ini adalah sebesar 0.83524 dari rata-rata.

5. Variabel pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan LnPE, terdiri dari 340 jumlah data kabupaten dan kota di Pulau Sumatera dari tahun 2008-2012 (N). Nilai minimum pertumbuhan ekonomi sebesar 22.92 adalah kota Sabang pada tahun 2011, sedangkan nilai maksimum pertumbuhan ekonomi sebesar 28.71 adalah kota Medan pada tahun 2012, mencerminkan adanya kesenjangan atau variasi yang kecil dari variabel terendah dan tertinggi. Nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2008-2012 adalah sebesar 25.1295 dengan standar deviasi sebesar 0.99544, mencerminkan tingkat kesalahan atau standar error dari variabel ini adalah sebesar 0.99544 dari rata-rata.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan telah terbebas dari masalah asumsi klasik (Widarjono, 2007).

4.2.1 Uji Normalitas

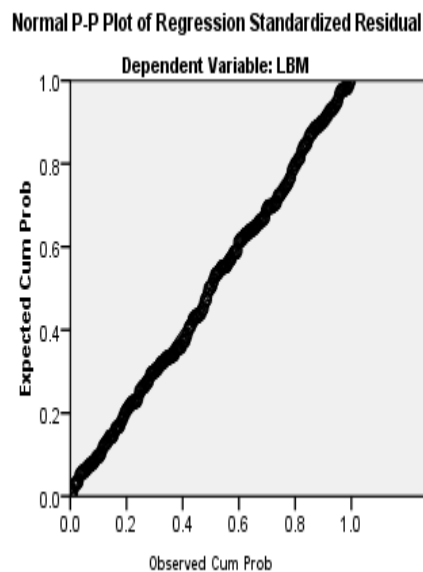
Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Widarjono, 2007).

Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan analisis grafik dan analisis statistik kolmogorov-smirnov.

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan metode grafik adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Dari hasil analisis grafik di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan atau mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		340
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.45750048
Most Extreme Differences	Absolute	.036
	Positive	.036
	Negative	-.019
Kolmogorov-Smirnov Z		.672
Asymp. Sig. (2-tailed)		.757

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data Output SPSS

Dari hasil uji kolmogorov-smirnov di atas, dihasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,757. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) di atas 0,05 dan model regresi tersebut layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat nilai tolerance dan nilai VIF, jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model

regresi tersebut (Widarjono, 2007). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	LnDAU	.631	1.585
	LnDAK	.766	1.306
	LnPAD	.526	1.901
	LnPE	.466	2.145

a. Dependent Variable: LnBM

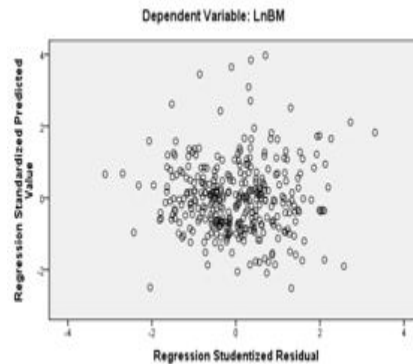
Sumber : Data Output SPSS

Dari hasil analisis uji multikolinieritas di atas, dihasilkan nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi ini dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplots*, jika grafik terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Widarjono, 2007). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.2.

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Output SPSS diolah

Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas di atas, pada grafik *scatterplot* terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Untuk mendeteksi masalah autokorelasi dalam persamaan regresi adalah menggunakan uji yang dapat dilakukan dengan menghitung nilai Durbin watson (Dw). Nilai Dw yang baik berada diantara -2 hingga +2 (Widarjono, 2007). Hasil analisis uji autokorelasi dengan uji durbin watson dapat dilihat dalam tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.617 ^a	.381	.374	.46022	1.275

a. Predictors: (Constant), LnPE, LnDAK, LnDAU, LnPAD

b. Dependent Variable: LnBM

Sumber : Data Output SPSS

Dari hasil pada tabel 4.6, dihasilkan Durbin Watson sebesar 1,275. Nilai ini berada di antara -2 hingga +2, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Widarjono, 2007).

Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel

4.7.

Tabel 4.7
Hasil Anlisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.582	1.686		8.055	.000
LnDAU	-.216	.066	-.177	3.275	.001
LnDAK	.316	.061	.256	5.204	.000
LnPAD	.127	.041	.182	3.074	.002
LnPE	.275	.037	.471	7.481	.000

a. Dependent Variable:
LnBM

Sumber : Data Output SPSS

Dari hasil analisis regresi linier berganda di atas, maka model persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{LnBM} = 13.582 - 0.216\text{LnDAU} + 0.316\text{LnDAK} + 0.127\text{LnPAD} + 0.275\text{LnPE}$$

Dari hasil model persamaan regresi diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Nilai intercept konstanta sebesar 13.582. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila besarnya nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka besarnya Ln belanja modal 13.582.
2. Variabel DAU ditunjukkan dengan Ln DAU. Besarnya koefisien DAU adalah sebesar -0.216. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel DAU naik 1%, maka belanja modal akan menurun sebesar 0.216 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
3. Variabel DAK ditunjukkan dengan LnDAK. Nilai koefisien regresi variabel DAK adalah sebesar 0.316. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel DAK naik 1%, maka belanja modal akan naik sebesar 0.316 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan..
4. Variabel PAD ditunjukkan dengan LnPAD. Nilai koefisien regresi variabel PAD adalah sebesar 0.127. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila variabel PAD naik 1%, maka belanja modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,127 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
5. Variabel pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan LnPE. Nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0.275. Hasil ini

dapat diartikan bahwa apabila variabel pertumbuhan ekonomi naik 1%, maka belanja modal naik 0.275 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Uji Statistik T

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Hipotesis
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.582	1.686		8.055	.000
LnDAU				-	
	-.216	.066	-.177	3.275	.001
LnDAK	.316	.061	.256	5.204	.000
LnPAD	.127	.041	.182	3.074	.002
LnPE	.275	.037	.471	7.481	.000

a. Dependent Variable:
LnBM

Sumber : Data Hasil Olah SPSS

Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel DAU. Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Besarnya koefisien regresi DAU yaitu -0.216, dapat disimpulkan bahwa

DAU tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap belanja modal, sehingga hipotesis pertama ditolak.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel DAK. Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Besarnya koefisien regresi DAK yaitu 0.316 dan nilai signifikansi 0,000. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal sehingga hipotesis kedua dalam penelitian diterima.

3. Pengujian hipotesis ketiga

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel PAD. Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Besarnya koefisien regresi PAD yaitu 0.127 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikansi $0,002 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel pertumbuhan ekonomi. Hipotesis keempat

penelitian ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal. Besarnya koefisien regresi pertumbuhan ekonomi yaitu 0.275 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal sehingga hipotesis keempat penelitian ini diterima.

4.4.2 Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen (Widarjono, 2007). Hasil analisis uji F dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9

Hasil Analisis Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	43.668	4	10.917	51.542	.000 ^a
	Residual	70.955	335	.212		
	Total	114.623	339			

a. Predictors: (Constant), LnPE, LnDAK, LnDAU, LnPAD

b. Dependent Variable: LnBM

Sumber : Data Output SPSS

Hasil analisis uji F table 4.9 dihasilkan nilai signifikansi F sebesar 0,000. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikansi F kurang dari 0,05.

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengukuran koefisien determinasi (Adjusted R^2) dilakukan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen (prediktor) terhadap perubahan variabel dependen (widarjono, 2007). Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 5.0.

Tabel 5.0
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.617 ^a	.381	.374	.46022

a. Predictors: (Constant), LnPE, LnDAK, LnDAU, LnPAD

b. Dependent Variable: LnBM

Sumber : Data diolah SPSS

Hasil analisis koefisien determinasi, dihasilkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0.381. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya variasi variabel *independent* dalam mempengaruhi model persamaan regresi adalah sebesar 38.1% dan sisanya sebesar 61.9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4.5 Pembahasan Variabel-Variabel Penelitian

4.5.1 Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Hipotesis dalam penelitian ini adalah DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil analisis data, variable DAU memiliki koefisien regresi -0.216 dapat disimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dapat dilihat dari koefisien regresinya yaitu negatif. Jika DAU mengalami kenaikan maka Belanja modal akan mengalami penurunan, demikian juga sebaliknya.

Diberlakukannya otonomi daerah diharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih bebas dalam mengelola keuangan daerah dan lebih efektif dan efisien dalam mengatur sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Namun Pemerintah Daerah cenderung untuk mengandalkan transferan dana yang diberikan Pemerintah Pusat. Hal ini karena masih besarnya kesenjangan fiskal antar daerah, sehingga berdampak kepada besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Besarnya DAU menunjukkan tersedianya dana yang digunakan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan untuk publik, sehingga terciptanya pelayanan yang layak untuk publik akan mengakibatkan pengeluaran belanja modal yang tidak sedikit.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003), Prakosa (2004), Darwanto dan Yustikasari (2007), Putro (2009), Pradita (2013), dan Nuarisa (2013) yang mengemukakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Hal tersebut karena kontribusi DAU sudah habis untuk pemenuhan belanja pegawai bukan pada belanja modal yang ditekankan untuk pengembangan daerah.

Selain itu, perbedaan karakteristik antar daerah satu dengan daerah yang lain dapat mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu perlu pengawasan dan kebijakan lebih terkait hal tersebut dan lebih memprioritaskan apa pentingnya otonomi daerah yang sebenarnya. Alokasi yang tepat dan sesuai dengan tujuan anggaran sektor publik yaitu melakukan distribusi ekonomi akan mengurangi kesenjangan fiskal, sehingga tercipta pemerataan keuangan daerah. Jumlah DAU pun sesuai dengan kapasitas fiskal daerah yang nantinya mengakibatkan alokasi untuk belanja modal benar-benar untuk pelayanan dasar umum dan pembangunan infrastruktur daerah.

Hal lain yang menyebabkan DAU tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal dilihat dari lambannya perkembangan ekonomi di Pulau Sumatera dibanding daerah-daerah lain seperti di Pulau Jawa. DAU yang diterima tidak dialokasikan untuk belanja modal, sehingga tingkat kemakmurannya juga berbeda dengan daerah-daerah lain di luar Pulau Sumatera.

Tingkat kemakmuran di Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemakmuran di pulau Sumatera, dilihat dari pembangunan yang jauh lebih pesat di pulau Jawa, sedangkan di pulau Sumatera pembangunan masih kurang, karena masih banyak terdapat daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Selain itu masih banyaknya lahan kosong dan potensial yang belum dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi daerah.

Perbedaan karakteristik masyarakat akan berimplikasi pada kontrol sosial yang berbeda pula, yang bisa mengakibatkan alokasi belanja modalpun berbeda juga. Kontrol sosial di luar pemerintahan terhadap pelayanan publik di luar pulau Jawa/Bali tidak sebaik di pulau Jawa/Bali (Abdullah, 2004 dalam Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011).

Selain itu adanya pemekaran daerah-daerah di Pulau Sumatera mengakibatkan sebaran DAU yang tidak semestinya, sehingga alokasi belanja modal pun berbeda.

4.5.2 Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal

Hipotesis dalam penelitian ini adalah DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil analisis data, variabel DAU memiliki koefisien regresi sebesar 0.316 dan signifikansi sebesar 0.000.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini dapat diartikan bahwa besar kecilnya DAK akan mempengaruhi belanja modal. Daerah-daerah yang menerima DAK akan memprioritaskan untuk pengembangan daerahnya yang lebih maju sehingga belanja modal yang dikeluarkanpun akan lebih besar seiring dengan DAK yang diperoleh daerah. DAK juga hanya digunakan untuk kepentingan khusus saja yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, terutama untuk membantu membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, seperti pembuatan rumah singgah, perpustakaan untuk daerah-daerah terpencil/tertinggal.

Selain itu pembuatan jembatan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah satunya dan pembangunan puskesmas untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang berada di daerah-daerah yang termasuk daerah khusus. Untuk menunjukkan komitmen daerah dalam pelaksanaan DAK, maka daerah wajib mengalokasikan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besarnya alokasi DAK yang diterima. Jadi semakin tinggi DAK yang diterima Pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula belanja modal yang dikeluarkan.

Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Situngkir (2009) dalam Nuarisa (2013) dan penelitian yang dilakukan Nuarisa (2013) yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

4.5.3 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Hipotesis penelitian ini adalah PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil analisis data, variabel PAD memiliki koefisien regresi sebesar 0.127 dan signifikansi sebesar 0.002, dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin besar PAD akan meningkatkan belanja modal yang besar juga. PAD yang diperoleh pemerintah daerah lebih banyak berasal dari pajak daerah. Semakin banyak pajak yang diterima akan meningkatkan belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk pengembangan daerah yang lebih maju dan peningkatan sarana dan prasarana yang lebih layak lagi.

Kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian PAD, semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, sehingga daerah akan semakin leluasa untuk mengalokasikan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di suatu daerah. Daerah yang memiliki PAD yang tinggi maka memiliki sumber dana untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat akan semakin baik (Adi,2006).

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) dan penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) yang mengemukakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

4.5.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan analisis data, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien regresi sebesar 0.275 dan signifikansi sebesar 0.000, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Hasil tersebut dapat diartikan bahwa besar kecilnya pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi belanja modal. Semakin besar pertumbuhan ekonomi semakin besar juga belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah dan sebaliknya.

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Dalam pelaksanaan otonomi

daerah, antara daerah satu dengan daerah lain sangat beragam. Perbedaan ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.

Pemberian otonomi yang besar akan memberikan dampak yang besar juga bagi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut akan mendorong daerah untuk mengalokasikan potensi daerah secara lebih efisien untuk kepentingan pelayanan publik.

Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh pesat akan menjadi indikator kemakmuran dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola, menggali daerahnya, dan melaksanakan otonomi daerahnya dengan tepat. Sehingga dihasilkan pembangunan daerah yang melaju pesat, infrastruktur yang memadai dan sarana prasarana yang layak untuk publik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yovita (2011) yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Dari beberapa pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan yang dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tabel Kesimpulan

No	Hipotesis	Hasil
1.	H ₁ : DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal.	Tidak Terdukung
2.	H ₂ : DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.	Terdukung
3.	H ₃ : PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal	Terdukung
4.	H ₄ : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal	Terdukung

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Hasil ini membuktikan bahwa semakin besar DAU akan mengakibatkan belanja modal mengalami penurunan, demikian pula sebaliknya.
2. DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini membuktikan bahwa apabila DAK mengalami peningkatan maka belanja modal juga akan mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya.
3. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini membuktikan bahwa besar kecilnya PAD akan mempengaruhi belanja modal. Apabila PAD mengalami peningkatan maka belanja modal juga akan mengalami peningkatan, berlaku juga sebaliknya.
4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini membuktikan bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi maka belanja modal akan semakin meningkat, dan sebaliknya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain:

1. Informasi masih terbatas pada laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah yang diakses dalam website Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen, sehingga 4 variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih belum mencakup semua faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal.

5.3 Saran

Dengan memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka dapat diberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan kroscek dan observasi langsung ke Pemerintah Daerah terkait untuk validasi data yang diperoleh dari website.
2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk menambahkan variabel penelitian lain seperti kebijakan Pemerintah Daerah, dan kinerja Pemerintah Daerah. Bisa jadi variabel tersebut lebih berpengaruh terhadap belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Halim. (2003). *Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi VI.
- Adi, Priyo Hari. (2006). *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi IX.
- Darwanto, dan Yulia Yustikasari. (2007). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Harianto, David & Priyo Hari Adi. (2007). *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Hakim, Abdul. (2002). *Ekonomi Pembangunan*. Ekonisia FE UII: Yogyakarta.
- Ismayanti, Titin. (2004). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Magelang)*, Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Ekonisia FE UII: Yogyakarta.
- Nuarisa, Sheila Ardhian. (2013). *Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Jurnal Akuntansi, Unnesa. Vol 1 No3. Hal 89-95.
- Pradita, Rizanda Ratna. (2013). *Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya. Vol 1 No. 2. Hal 1-28.

- Prakosa, Kesit Bambang. (2004). *Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Provinsi Jawa Tengah dan DIY)*. JAAI. Vol. 8 No. 2, 101-118.
- Putro, Nugroho Suratno. (2009). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU terhadap pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)*. www.ejournal.undip.ac.id
- Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tatacara Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah. Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Republik Indonesia. Undang- undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Samuelson, Paul A. (1995). *Makro Ekonomi*. Edisi keempatbelas. Erlangga: Jakarta.
- Sekaran, Uma. (2006). *Metodelogi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi keempat. Salemba Empat: Jakarta.

Suhardjanto, Djoko dan Rena Rukmita Yulianingtyas. (2011). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Keptuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/kota di Indonesia)*. Jurnal Akuntansi dan Auditing. Vol 8 No 1. Hal 30-42.

Todaro, Michel P. (1998). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Enam. Erlangga: Jakarta.

Widarjono, Agus. (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*. Ekonisia FEUII: Yogyakarta.

Yovita, Farah Marta. (2011). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)*. www.ejournal.undip.ac.id

www.bps.go.id

www.depkeu.djpk.go.id

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Daftar Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota
1	Kab. Aceh Barat
2	Kab. Aceh selatan
3	Kab. Bireuen
4	Kota Sabang
5	Kab. Aceh Barat Daya
6	Kab. Aceh Jaya
7	Kab. Nagan Raya
8	Kab. Aceh Tamiang
9	Kab. Bener Meriah
10	Kab. Pidie Jaya
11	Kab. Asahan
12	Kab. Dairi
13	Kab. Langkat
14	Kab. Mandailing Natal
15	Kab. Simalungun
16	Kab. Tapanuli Selatan
17	Kab. Tapanuli Utara
18	Kab. Toba Samosir
19	Kota Binjai
20	Kota Medan
21	Kota Pematang Siantar
22	Kota Sibolga
23	Kota Tanjung Balai
24	Kota Tebing Tinggi
25	Kota Padang Sidempuan
26	Kab. Humbang Hasundutan
27	Kab. Samosir
28	Kab. Lima Puluh Kota
29	Kab. Agam
30	Kab. Kepulauan Mentawai
31	Kab. Padang Pariaman
32	Kab. Sawahlunto Sijunjung
33	Kab. Solok
34	Kab. Tanah Datar
35	Kota Bukit Tinggi
36	Kota Padang Panjang
37	kota Payakumbuh

38	Kota Sawahlunto
39	Kota Solok
40	Kota Pariaman
41	Kab. Pelalawan
42	Kota Pekanbaru
43	Kab. Batanghari
44	Kab. Bungo
45	Kab. Merangin
46	Kab. Muaro Jambi
47	Kab. Sarolangun
48	Kab. Tebo
49	Kota Jambi
50	Kab. Musi Banyuasin
51	Kab. Musi Rawas
52	Kab. Muara Enim
53	Kab. Ogan Komering Ilir
54	Kota Pagar Alam
55	Kota Lubuk Linggau
56	Kab. Banyuasin
57	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
58	Kab. Ogan komering Ulu Selatan
59	Kab. Empat Lawang
60	Kab. Bengkulu Selatan
61	Kota Bengkulu
62	Kab. Kaur
63	Kab. Mukomuko
64	Kab. Lampung Barat
65	Kab. Lampung Utara
66	Kab. Way Kanan
67	Kota Bandar Lampung
68	Kota Metro

LAMPIRAN 2

DATA VARIABEL PENELITIAN

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Ln BM	Ln DAU	Ln DAK	Ln PAD	Ln PE
	2008						
1		Kab. Aceh Barat	25,262130	26,438528	24,605609	24,064708	24,800803
2		Kab. Aceh selatan	25,390637	26,478514	24,466584	23,397684	24,484466
3		Kab. Bireuen	25,730257	31,273272	24,776659	24,633805	25,567453
4		Kota Sabang	24,534825	25,941817	23,889804	23,615643	22,920490
5		Kab. Aceh Barat Daya	25,106676	26,147882	24,417108	22,924645	23,981362
6		Kab. Aceh Jaya	25,853768	25,993030	24,286752	22,889780	23,025851
7		Kab. Nagan Raya	25,069303	26,345325	24,499144	23,260303	24,157253
8		Kab. Aceh Tamiang	25,646963	26,194311	24,480341	23,085127	24,124463
9		Kab. Bener Meriah	25,056612	26,134006	24,440271	22,642344	23,981362
10		Kab. Pidie Jaya	23,716474	25,548080	22,776543	21,341418	24,124463
11		Kab. Asahan	25,979206	26,778343	25,063964	23,843111	26,178587
12		Kab. Dairi	25,645013	26,514474	24,736057	23,160526	25,117715
13		Kab. Langkat	25,410383	27,102314	24,897268	23,944409	26,472659
14		Kab. Mandailing Natal	25,716690	26,700718	24,709017	23,221936	25,414614
15		Kab. Simalungun	26,351524	27,193740	25,106929	24,142453	26,152611
16		Kab. Tapanuli Selatan	26,175741	26,994168	24,923786	23,877089	25,067071
17		Kab. Tapanuli Utara	25,589935	26,546464	24,674773	22,979412	25,092714
18		Kab. Toba Samosir	25,320364	26,253266	24,683868	23,077301	25,154083

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Ln BM	Ln DAU	Ln DAK	Ln PAD	Ln PE
19		Kota Binjai	25,064296	26,345196	24,068563	23,351015	25,266561
20		Kota Medan	26,214375	27,428460	23,828973	26,693289	28,334614
21		Kota Pematang Siantar	25,038651	26,466407	24,117271	23,859286	25,318386
22		Kota Sibolga	25,297493	26,067787	24,277928	23,180945	24,306785
23		Kota Tanjung Balai	25,664416	26,137159	24,056976	23,257222	24,615086
24		Kota Tebing Tinggi	25,413535	26,125555	24,162273	23,663479	24,800803
25		Kota Padang Sidempuan	24,972206	26,272936	24,114042	22,990699	24,594467
26		Kab. Humbang Hasundutan	25,775265	26,251111	24,419044	22,922097	24,635289
27		Kab. Samosir	25,694320	26,114428	24,743605	22,954462	24,551907
28		Kab. Lima Puluh Kota	25,900153	26,676559	24,817677	23,755279	25,713698
29		Kab. Agam	25,431120	26,751257	24,852929	23,908824	25,841260
30		Kab. Kepulauan Mentawai	25,089600	26,333837	23,359799	24,042294	23,767788
31		Kab. Padang Pariaman	25,537550	26,732832	24,858624	21,591117	25,766691
32		Kab. Sawahlunto Sijunjung	25,279500	26,335612	24,444007	23,918824	24,817610
33		Kab. Solok	25,292043	26,624212	24,736183	23,634154	25,468198
34		Kab. Tanah Datar	25,652957	26,647118	24,673432	24,185134	25,590800
35		Kota Bukit Tinggi	24,949929	26,188807	24,119203	24,244571	24,766317
36		Kota Padang Panjang	25,011518	25,987850	24,104090	23,322803	23,814308
37		kota Payakumbuh	24,871216	26,181534	24,010903	24,172968	24,551907
38		Kota Sawahlunto	24,949672	25,957744	24,226659	23,861362	23,431316
39		Kota Solok	25,191664	26,050271	24,214852	23,798022	24,090562
40		Kota Pariaman	25,221849	26,131299	24,412245	23,314167	24,249626

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Ln BM	Ln DAU	Ln DAK	Ln PAD	Ln PE
41		Kab. Pelalawan	26,280506	25,999473	22,756794	24,188324	25,949013
42		Kota Pekanbaru	25,880363	26,585019	23,115236	25,719639	27,173736
43		Kab. Batanghari	25,784112	26,286630	24,498529	23,760883	24,850400
44		Kab. Bungo	26,208076	26,483875	24,440080	24,886121	25,450654
45		Kab. Merangin	25,701950	26,549741	24,484466	21,744336	24,766317
46		Kab. Muaro Jambi	26,069757	26,345270	24,552842	23,523718	24,674510
47		Kab. Sarolangun	25,829367	26,333393	24,535042	23,605432	25,067071
48		Kab. Tebo	26,349511	26,358212	24,472982	23,556356	24,573413
49		Kota Jambi	25,543277	26,637647	24,310555	24,713857	25,882321
50		Kab. Musi Banyuasin	27,131640	25,899959	24,617858	24,169197	26,382748
51		Kab. Musi Rawas	26,824649	26,833455	24,860293	24,150868	25,921763
52		Kab. Muara Enim	26,603714	26,714514	23,086287	24,749564	26,749132
53		Kab. Ogan Komering Ilir	26,180868	26,958452	24,829901	24,029646	25,733901
54		Kota Pagar Alam	25,823877	25,955487	24,203675	23,007522	23,718998
55		Kota Lubuk Linggau	25,946081	26,075075	23,943940	23,736944	24,800803
56		Kab. Banyuasin	26,383226	26,786855	24,595433	23,255697	26,098544
57		Kab. Ogan Komering Ulu Timur	26,033429	26,606187	24,578621	23,150677	25,357995
58		Kab. Ogan komering Ulu Selatan	26,299887	26,264726	24,333707	23,301054	24,800803
59		Kab. Empat Lawang	25,179827	25,416346	22,247065	21,643509	24,460935
60		Kab. Bengkulu Selatan	25,479559	26,312947	24,902533	23,280983	23,901320
61		Kota Bengkulu	25,355397	26,538375	24,439250	23,924768	25,234125
62		Kab. Kaur	25,330895	26,025882	24,459125	22,481404	23,208172

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Ln BM	Ln DAU	Ln DAK	Ln PAD	Ln PE
63		Kab. Mukomuko	25,247999	26,133824	24,522792	22,620879	24,219773
64		Kab. Lampung Barat	25,636084	26,509126	24,614392	23,570815	24,912921
65		Kab. Lampung Utara	25,920365	26,810323	24,722530	23,528554	25,817016
66		Kab. Way Kanan	26,069651	26,418758	24,453916	23,395763	24,748618
67		Kota Bandar Lampung	25,550804	26,956645	24,477113	24,937783	26,652855
68		Kota Metro	24,888537	26,069132	24,049847	23,717493	23,942142
	2009						
69		Kab. Aceh Barat	25,169747	26,477880	24,540684	23,664779	24,766317
70		Kab. Aceh selatan	24,706471	26,511680	24,496647	23,512258	23,942142
71		Kab. Bireuen	25,093504	26,694428	24,572285	24,572285	25,559548
72		Kota Sabang	24,838365	25,929760	24,484559	23,440814	23,121161
73		Kab. Aceh Barat Daya	24,647250	26,169449	24,361773	24,361773	24,019103
74		Kab. Aceh Jaya	25,590915	26,110129	24,322330	23,182570	23,121161
75		Kab. Nagan Raya	25,254194	26,504652	24,425506	23,235138	24,189002
76		Kab. Aceh Tamiang	25,079487	26,282393	24,544036	24,544036	24,090562
77		Kab. Bener Meriah	24,822376	26,149601	24,389976	22,310459	24,157253
78		Kab. Pidie Jaya	25,346342	26,082412	24,599973	22,147739	24,157253
79		Kab. Asahan	25,269630	26,824822	25,073957	23,771411	26,156988
80		Kab. Dairi	25,253718	26,515757	24,595008	23,379636	25,200603
80		Kab. Dairi	25,253718	26,515757	24,595008	23,379636	25,200603
81		Kab. Langkat	25,499437	27,115975	24,881711	24,249247	26,513226
82		Kab. Mandailing Natal	25,223331	26,677082	24,689417	23,034379	25,459464

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Ln BM	Ln DAU	Ln DAK	Ln PAD	Ln PE
83		Kab. Simalungun	26,026090	27,175990	25,073234	24,541367	26,240719
84		Kab. Tapanuli Selatan	25,856839	26,339759	24,715762	23,853977	24,912921
86		Kab. Toba Samosir	25,598058	26,357675	24,636408	22,991402	25,154083
87		Kota Binjai	24,759428	26,370958	24,069620	23,572388	25,386705
88		Kota Medan	26,756989	27,505702	24,648106	26,632880	28,351783
89		Kota Pematang Siantar	25,182336	26,451817	24,392657	23,741661	25,308233
90		Kota Sibolga	24,911236	26,076103	24,346566	23,274284	24,360852
91		Kota Tanjung Balai	25,491055	26,152051	24,444758	23,533877	24,730599
92		Kota Tebing Tinggi	25,433099	26,123260	24,228373	23,576227	24,850400
93		Kota Padang Sidempuan	24,784601	26,270546	24,380422	23,194412	24,615086
94		Kab. Humbang Hasundutan	25,543708	26,284161	24,620317	22,807687	24,615086
95		Kab. Samosir	25,311535	26,182593	24,744986	23,420083	24,594467
96		Kab. Lima Puluh Kota	25,031737	26,693388	24,996565	23,143011	25,657740
97		Kab. Agam	25,304995	26,760545	24,722915	23,979680	25,643247
98		Kab. Kepulauan Mentawai	25,311437	26,346015	24,340260	24,097027	23,814308
99		Kab. Padang Pariaman	25,299363	26,757370	24,803630	23,853568	25,367657
100		Kab. Sawahlunto Sijunjung	25,255042	26,355931	24,358111	23,980680	24,927958
101		Kab. Solok	24,573363	26,633642	24,586729	23,709265	25,510758
102		Kab. Tanah Datar	25,067154	26,663172	24,823394	24,321759	25,643247
103		Kota Bukit Tinggi	24,935018	26,187547	24,337233	24,384053	24,655091
104		Kota Padang Panjang	24,868341	25,995583	24,365892	23,840388	23,901320

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Ln BM	Ln DAU	Ln DAK	Ln PAD	Ln PE
105		kota Payakumbuh	24,846070	26,193381	24,319454	24,206208	24,529928
106		Kota Sawahlunto	24,462206	25,972004	24,442796	24,001655	23,767788
107		Kota Solok	25,176380	26,050328	24,357346	23,894174	23,901320
108		Kota Pariaman	25,073019	26,128075	24,523843	23,229867	24,124463
109		Kab. Pelalawan	26,434668	26,096835	24,348198	24,123816	26,165684
110		Kota Pekanbaru	26,139941	26,595104	22,819687	25,589723	27,235011
111		Kab. Batanghari	25,249543	26,349591	24,415863	23,631723	24,730599
112		Kab. Bungo	25,802236	26,463895	24,472140	24,447914	25,013725
113		Kab. Merangin	25,745766	26,570098	24,559789	24,049099	25,177613
114		Kab. Muaro Jambi	25,972278	26,401283	24,599703	23,418211	24,800803
115		Kab. Sarolangun	25,937293	26,334380	24,507774	23,758720	25,154083
116		Kab. Tebo	25,467864	26,362997	24,502603	23,623305	24,436838
117		Kota Jambi	25,468086	26,638834	24,318823	24,742730	25,996265
118		Kab. Musi Banyuasin	26,990562	25,186077	24,095309	24,325414	26,436999
119		Kab. Musi Rawas	26,665048	26,686822	24,733232	24,175450	25,804670
120		Kab. Muara Enim	26,629786	24,409696	24,268737	24,967314	26,623163
121		Kab. Ogan Komering Ilir	25,984612	27,003164	25,015299	24,233152	25,740546
122		Kota Pagar Alam	25,735956	25,886352	24,298445	23,237054	23,718998
123		Kota Lubuk Linggau	25,717569	26,056064	24,395889	23,498253	24,866401
124		Kab. Banyuasin	26,014168	26,813104	24,875077	23,911966	26,174304
125		Kab. Ogan Komering Ulu Timur	25,072005	26,612353	24,694576	23,022993	25,432796
126		Kab. Ogan komering Ulu Selatan	26,032972	26,257806	24,499927	23,049934	24,957372

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Ln BM	Ln DAU	Ln DAK	Ln PAD	Ln PE
127		Kab. Empat Lawang	25,655729	25,970403	24,275581	22,919792	24,551907
128		Kab. Bengkulu Selatan	25,028725	26,330665	24,639201	23,816217	23,942142
129		Kota Bengkulu	25,420489	26,553056	24,488527	24,057138	25,367657
130		Kab. Kaur	25,354268	26,045833	24,615168	22,921860	22,920490
131		Kab. Mukomuko	25,761207	26,179037	24,681886	22,917487	23,814308
132		Kab. Lampung Barat	25,783544	26,538483	24,746848	23,541817	25,053999
133		Kab. Lampung Utara	25,659793	26,842502	24,829308	23,190860	25,975539
134		Kab. Way Kanan	26,334598	26,514075	24,492250	23,164039	24,882149
135		Kota Bandar Lampung	25,133389	26,993554	24,795723	24,977917	26,578338
136		Kota Metro	25,110611	26,149737	24,351387	23,770661	24,019103
	2010						
137		Kab. Aceh Barat	25,187103	26,464203	24,239843	23,912383	24,817610
138		Kab. Aceh selatan	25,067746	26,550168	24,373404	23,590312	24,674510
139		Kab. Bireuen	24,820107	26,696561	24,659103	23,079107	25,535450
140		Kota Sabang	24,790291	26,084985	23,547082	23,564972	23,208172
141		Kab. Aceh Barat Daya	24,973659	26,202637	24,120556	22,656814	24,157253
142		Kab. Aceh Jaya	25,604415	26,035718	23,907467	23,449156	23,208172
143		Kab. Nagan Raya	25,073712	26,397365	24,115422	23,121706	24,360852
144		Kab. Aceh Tamiang	24,704050	26,221540	24,289215	23,758844	23,942142
145		Kab. Bener Meriah	25,383047	26,186962	24,139483	22,994154	24,386827
146		Kab. Pidie Jaya	25,564125	26,166121	24,299984	22,248887	24,219773
147		Kab. Asahan	25,308284	26,895590	24,600449	23,980670	26,268443

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Ln BM	Ln DAU	Ln DAK	Ln PAD	Ln PE
148		Kab. Dairi	25,119812	26,542945	24,510020	23,710714	25,308233
149		Kab. Langkat	25,488785	27,208971	24,910873	24,168703	26,694528
150		Kab. Mandailing Natal	25,387865	26,710928	24,785965	23,193482	25,535450
151		Kab. Simalungun	25,726702	27,191911	24,851255	24,535579	26,325385
152		Kab. Tapanuli Selatan	25,411195	26,536611	24,448839	24,140861	25,177613
153		Kab. Tapanuli Utara	25,285163	26,634807	24,594842	23,459774	25,165917
154		Kab. Toba Samosir	25,280852	26,359658	24,572328	23,207172	25,245054
155		Kota Binjai	24,694934	26,405266	23,935359	23,658823	25,476856
156		Kota Medan	26,771685	27,464424	24,930954	27,101592	28,503151
157		Kota Pematang Siantar	24,965614	26,472471	23,863401	23,977895	25,450654
158		Kota Sibolga	24,525630	26,149167	23,621110	23,439152	24,460935
159		Kota Tanjung Balai	24,962129	26,211877	23,694090	23,906556	24,882149
160		Kota Tebing Tinggi	24,488551	26,152861	23,602857	23,991770	24,927958
161		Kota Padang Sidempuan	24,050709	26,322165	23,751514	23,404424	24,655091
162		Kab. Humbang Hasundutan	25,137397	26,357673	24,097777	23,026551	24,674510
163		Kab. Samosir	25,136646	26,216496	24,386032	23,192466	24,748618
164		Kab. Lima Puluh Kota	25,018876	26,743106	24,614249	21,084431	25,804670
165		Kab. Agam	24,517811	26,799777	24,733032	23,856671	25,835254
166		Kab. Kepulauan Mentawai	25,336593	26,384450	23,925850	24,066975	23,942142
167		Kab. Padang Pariaman	25,170858	26,758424	24,678463	23,930312	25,679093
168		Kab. Sawahlunto Sijunjung	25,600316	26,396926	24,188283	23,813080	24,985946
169		Kab. Solok	24,737809	26,752558	24,644883	23,699815	25,543547

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Ln BM	Ln DAU	Ln DAK	Ln PAD	Ln PE
170		Kab. Tanah Datar	24,318521	26,690384	24,564416	24,329931	25,700000
171		Kota Bukit Tinggi	24,592736	26,213467	23,623973	24,245116	24,800803
172		Kota Padang Panjang	25,110666	26,086115	24,353456	24,028540	23,901320
173		kota Payakumbuh	24,568529	26,231808	23,192890	24,324461	24,693558
174		Kota Sawahlunto	24,723721	26,031895	23,671644	23,892195	23,942142
175		Kota Solok	24,635029	26,071011	23,347282	23,645029	24,090562
176		Kota Pariaman	25,164551	26,190013	23,681815	23,423553	24,306785
177		Kab. Pelalawan	25,719653	25,979046	23,456464	24,370854	26,060804
178		Kota Pekanbaru	26,052592	26,359066	23,167003	25,789525	27,336650
179		Kab. Batanghari	24,873613	26,370993	24,407007	23,824214	24,942774
180		Kab. Bungo	25,798796	26,465599	27,046316	24,548925	25,117715
181		Kab. Merangin	25,497605	26,588560	24,551516	23,954702	25,177613
182		Kab. Muaro Jambi	25,763719	26,450475	24,576048	23,546488	25,543547
183		Kab. Sarolangun	25,474076	26,438815	24,457812	23,663591	25,255865
184		Kab. Tebo	26,018629	26,377795	24,411695	23,493101	24,655091
185		Kota Jambi	25,210665	26,661298	24,196319	24,983718	24,783709
186		Kab. Musi Banyuasin	26,987991	25,108487	24,633728	24,882618	26,537396
187		Kab. Musi Rawas	26,454070	26,533436	24,686286	24,477769	25,910652
188		Kab. Muara Enim	26,288525	26,641834	23,420794	24,907680	26,763521
189		Kab. Ogan Komering Ilir	25,982234	27,018037	24,929554	24,250655	25,949013
190		Kota Pagar Alam	25,351801	25,920027	23,590596	23,538734	24,189002
191		Kota Lubuk Linggau	25,684837	26,114860	23,684251	23,519693	24,927958

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Ln BM	Ln DAU	Ln DAK	Ln PAD	Ln PE
192		Kab. Banyuasin	26,066074	26,835243	24,833828	23,836648	26,332738
193		Kab. Ogan Komering Ulu Timur	25,534352	26,668731	24,645813	23,817440	25,590800
194		Kab. Ogan komering Ulu Selatan	25,630901	26,287882	24,552038	23,296183	25,013725
195		Kab. Empat Lawang	25,552299	25,984364	24,140632	23,150014	24,674510
196		Kab. Bengkulu Selatan	24,529862	26,377441	24,306285	23,199300	24,124463
197		Kota Bengkulu	25,363629	26,585365	23,956597	24,007068	25,575296
198		Kab. Kaur	24,996440	26,110569	24,360273	22,522663	23,025851
199		Kab. Mukomuko	25,185950	26,244431	24,258848	22,924261	24,090562
200		Kab. Lampung Barat	25,904010	26,574287	24,469683	23,508401	25,117715
201		Kab. Lampung Utara	25,811707	26,877548	25,064783	23,325881	25,792170
202		Kab. Way Kanan	25,291596	26,469162	24,441656	22,891748	24,957372
203		Kota Bandar Lampung	25,282842	27,013477	24,252681	25,185627	26,689413
204		Kota Metro	25,137130	26,271217	23,674471	24,040320	24,189002
	2011						
205		Kab. Aceh Barat	24,993145	26,629020	24,367436	23,769786	24,897653
206		Kab. Aceh selatan	24,721632	26,686256	24,511561	23,565905	24,783709
207		Kab. Bireuen	25,438079	26,895407	24,542164	23,545656	25,720478
208		Kota Sabang	25,266412	26,210876	23,993139	23,831702	22,920490
209		Kab. Aceh Barat Daya	25,182335	26,339688	24,474768	23,181486	24,249626
210		Kab. Aceh Jaya	25,560753	26,265784	24,381248	23,364606	23,208172
211		Kab. Nagan Raya	25,411710	26,525345	24,183298	23,495354	24,529928
212		Kab. Aceh Tamiang	25,123108	26,442360	24,235259	23,426169	24,817610

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Ln BM	Ln DAU	Ln DAK	Ln PAD	Ln PE
213		Kab. Bener Meriah	25,415787	26,377179	24,223162	23,291747	24,386827
214		Kab. Pidie Jaya	25,681660	26,334878	24,555098	22,971078	24,124463
215		Kab. Asahan	25,911980	26,983919	24,647731	24,184115	26,393147
216		Kab. Dairi	25,035433	26,643162	24,510723	23,595304	25,405397
217		Kab. Langkat	25,502725	27,325700	24,709877	24,265384	26,753951
218		Kab. Mandailing Natal	25,203077	26,844427	24,603819	24,038361	25,590800
219		Kab. Simalungun	25,606840	27,268939	25,026587	24,473781	26,504009
220		Kab. Tapanuli Selatan	25,649323	26,652570	24,518553	24,774407	25,266561
221		Kab. Tapanuli Utara	25,960468	26,729180	24,762644	24,308533	25,223076
222		Kab. Toba Samosir	25,372950	26,460651	24,663565	23,370646	25,255865
223		Kota Binjai	25,605606	26,542693	23,952725	23,999278	25,567453
224		Kota Medan	27,248125	27,695266	25,125022	27,626081	28,644076
225		Kota Pematang Siantar	25,013958	26,588387	23,933424	24,525295	25,535450
226		Kota Sibolga	25,222664	26,238326	23,847963	23,798872	24,360852
227		Kota Tanjung Balai	25,245109	26,341944	23,728849	24,022394	24,942774
228		Kota Tebing Tinggi	25,263385	26,291412	23,818210	24,211802	25,067071
229		Kota Padang Sidempuan	25,051047	26,453411	23,964607	23,789690	24,730599
230		Kab. Humbang Hasundutan	25,089265	26,470845	24,176613	23,278165	24,800803
231		Kab. Samosir	25,508213	26,368670	24,296257	23,376578	24,882149
232		Kab. Lima Puluh Kota	25,358597	26,869156	24,566689	23,902943	25,916223
233		Kab. Agam	25,174970	26,918032	24,614555	24,358059	25,938202

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Ln BM	Ln DAU	Ln DAK	Ln PAD	Ln PE
234		Kab. Kepulauan Mentawai	25,523180	26,500454	24,290062	24,353562	24,019103
235		Kab. Padang Pariaman	25,492356	26,864027	24,922751	24,021803	25,792170
236		Kab. Sawahlunto Sijunjung	25,540235	26,526562	24,462292	24,062410	25,067071
237		Kab. Solok	25,190897	26,899164	24,674779	24,145278	25,613615
238		Kab. Tanah Datar	25,077266	26,792753	24,590814	24,665857	25,753704
239		Kota Bukit Tinggi	24,644387	26,332199	23,584838	24,466231	24,882149
240		Kota Padang Panjang	24,919234	26,202629	23,319341	24,141222	23,981362
241		kota Payakumbuh	24,541176	26,284517	23,776890	24,520125	24,800803
242		Kota Sawahlunto	24,981301	26,139895	23,984933	24,317340	24,124463
243		Kota Solok	24,849513	26,191756	23,397001	23,888530	24,189002
244		Kota Pariaman	25,463159	26,294925	23,812352	23,559299	24,484466
245		Kab. Pelalawan	26,290300	26,619436	23,610800	24,565917	26,139366
246		Kota Pekanbaru	26,198105	26,915252	23,581573	26,131473	27,485995
247		Kab. Batanghari	25,388147	26,566222	24,170901	24,299229	25,277143
248		Kab. Bungo	25,499966	26,661377	24,607609	24,829341	25,318386
249		Kab. Merangin	25,902473	26,754254	24,561341	24,403281	25,142106
250		Kab. Muaro Jambi	25,813993	26,639444	24,519182	24,063332	25,211902
251		Kab. Sarolangun	25,948340	26,589606	24,464927	24,176581	25,405397
252		Kab. Tebo	25,811424	26,583961	24,474510	23,695576	24,834140
253		Kota Jambi	25,739631	26,813553	24,269227	25,318376	26,195537
254		Kab. Musi Banyuasin	27,509836	26,410607	24,846926	25,113310	26,686845
255		Kab. Musi Rawas	26,523167	26,870180	24,850045	24,904201	26,089242

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Ln BM	Ln DAU	Ln DAK	Ln PAD	Ln PE
256		Kab. Muara Enim	26,547359	26,861550	24,454294	25,188450	26,834733
257		Kab. Ogan Komering Ilir	26,628423	27,230400	24,919174	24,581614	26,156988
258		Kota Pagar Alam	25,704198	26,162779	23,811851	24,018806	24,219773
259		Kota Lubuk Linggau	25,902653	26,312897	23,719948	24,258470	25,013725
260		Kab. Banyuasin	26,166363	27,013219	25,089620	24,117136	26,400020
261		Kab. Ogan Komering Ulu Timur	25,993965	26,846988	24,761410	24,145278	25,760218
262		Kab. Ogan komering Ulu Selatan	26,237577	26,547577	24,534075	23,338908	25,189174
263		Kab. Empat Lawang	25,803937	26,196637	24,451847	23,639901	24,800803
264		Kab. Bengkulu Selatan	25,056299	26,498727	24,351121	23,415051	24,334184
265		Kota Bengkulu	25,131606	26,708848	24,032713	24,394948	25,686110
266		Kab. Kaur	25,123415	26,239682	24,318302	22,641658	23,208172
267		Kab. Mukomuko	25,044228	26,364779	24,270812	22,957679	24,249626
268		Kab. Lampung Barat	25,812201	26,721058	24,804306	23,794198	24,957372
269		Kab. Lampung Utara	25,883217	27,055275	24,934638	24,082321	26,016571
270		Kab. Way Kanan	25,459754	26,635303	24,652559	22,971606	25,067071
271		Kota Bandar Lampung	25,422900	27,162044	24,389695	25,815899	26,780050
272		Kota Metro	25,518445	26,327235	23,881372	24,460912	24,306785
	2012						
273		Kab. Aceh Barat	24,723062	26,811367	24,378976	23,931162	24,912921
274		Kab. Aceh selatan	25,038618	26,865920	24,608904	24,234871	24,850400
275		Kab. Bireuen	25,304983	27,140976	24,657089	23,856235	25,779512
276		Kota Sabang	25,093953	26,335196	23,600946	23,939217	23,121161

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Ln BM	Ln DAU	Ln DAK	Ln PAD	Ln PE
277		Kab. Aceh Barat Daya	25,596125	26,514977	24,563084	24,107893	24,334184
278		Kab. Aceh Jaya	25,221452	26,438446	24,131704	23,461069	23,208172
279		Kab. Nagan Raya	25,282266	26,707159	24,036652	24,044301	24,674510
280		Kab. Aceh Tamiang	24,821636	26,722795	24,470296	24,122294	25,040754
281		Kab. Bener Meriah	25,035540	26,529834	24,220046	23,441596	24,460935
282		Kab. Pidie Jaya	25,157209	26,452749	24,293503	22,998274	24,278614
283		Kab. Asahan	26,280970	27,167357	24,900817	24,358059	26,479008
284		Kab. Dairi	25,308070	26,835123	24,492734	23,763541	25,485440
285		Kab. Langkat	26,264737	27,465560	24,749617	25,584960	26,791691
286		Kab. Mandailing Natal	25,613968	27,016883	24,450284	23,780752	25,657740
287		Kab. Simalungun	26,475496	27,486465	25,232674	24,838164	26,601002
288		Kab. Tapanuli Selatan	25,992124	26,842072	24,700440	24,751471	25,318386
289		Kab. Tapanuli Utara	25,867896	26,912240	24,639679	24,250303	25,338386
290		Kab. Toba Samosir	25,760095	26,683299	24,676795	23,529168	25,348239
291		Kota Binjai	25,787183	26,756268	23,891985	24,598168	25,635921
292		Kota Medan	27,048393	27,774073	24,917426	27,768276	28,710451
293		Kota Pematang Siantar	25,232266	26,786195	24,071309	24,633587	25,535450
294		Kota Sibolga	25,233026	26,403005	23,682853	24,007854	24,436838
295		Kota Tanjung Balai	25,460210	26,471799	23,611134	24,044770	25,013725
296		Kota Tebing Tinggi	25,307774	26,452183	23,954979	24,580410	25,154083
297		Kota Padang Sidempuan	25,315938	26,622952	23,900736	23,885444	24,850400
298		Kab. Humbang Hasundutan	25,547515	26,655105	24,089458	23,608122	24,882149

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Ln BM	Ln DAU	Ln DAK	Ln PAD	Ln PE
299		Kab. Samosir	25,170881	26,526631	24,049883	23,583121	24,942774
300		Kab. Lima Puluh Kota	25,447294	27,034565	24,516843	23,939578	25,985956
301		Kab. Agam	25,193441	27,113025	25,030057	24,450693	26,134912
302		Kab. Kepulauan Mentawai	25,764702	26,639939	24,007480	24,268246	24,090562
303		Kab. Padang Pariaman	25,609063	27,048046	24,880851	24,166469	25,938202
304		Kab. Sawahlunto Sijunjung	25,350755	26,687940	24,484280	24,214091	25,189174
305		Kab. Solok	25,628333	26,980472	24,726262	23,999618	25,693079
306		Kab. Tanah Datar	25,183237	26,977272	24,594050	24,706511	25,785861
307		Kota Bukit Tinggi	24,649862	26,510850	23,459709	24,531616	24,971761
308		Kota Padang Panjang	24,575772	26,320242	23,647985	24,202041	24,055470
309		kota Payakumbuh	24,918737	26,507162	23,964255	24,649350	24,866401
310		Kota Sawahlunto	24,939179	26,317836	23,730729	24,275380	24,219773
311		Kota Solok	25,371438	26,359825	23,897479	23,872577	24,306785
312		Kota Pariaman	25,112938	26,424562	24,019917	23,589914	24,551907
313		Kab. Pelalawan	26,456057	26,766013	24,010809	24,743048	26,232654
314		Kota Pekanbaru	26,378313	24,853910	23,898524	26,458334	27,677905
315		Kab. Batanghari	26,096909	26,782139	24,189314	24,340354	25,245054
316		Kab. Bungo	25,358548	26,846574	24,417779	24,886530	25,377226
317		Kab. Merangin	26,035432	26,956998	24,566046	24,128190	25,129985
318		Kab. Muaro Jambi	26,228520	26,850722	24,779181	24,317477	25,338386
319		Kab. Sarolangun	26,114650	26,763142	24,668491	24,055720	25,377226
320		Kab. Tebo	26,063986	26,741484	24,254350	24,016841	24,882149

No	Tahun	Kabupaten/Kota	Ln BM	Ln DAU	Ln DAK	Ln PAD	Ln PE
321		Kota Jambi	26,238455	27,021439	24,412395	25,451450	26,280094
322		Kab. Musi Banyuasin	27,675784	26,514910	24,344990	25,295210	26,886581
323		Kab. Musi Rawas	26,827425	27,010425	24,805656	25,013972	26,084558
324		Kab. Muara Enim	27,043050	27,086835	24,534761	25,506214	26,907415
325		Kab. Ogan Komering Ilir	26,666837	27,334571	25,138739	24,723629	26,174304
326		Kota Pagar Alam	25,925177	26,317650	23,960924	24,272625	24,412145
327		Kota Lubuk Linggau	25,813002	26,517139	24,159154	24,367540	25,079975
328		Kab. Banyuasin	26,545521	27,202325	25,302636	24,939341	26,472659
329		Kab. Ogan Komering Ulu Timur	25,830961	27,017515	24,598023	24,273831	25,910652
330		Kab. Ogan komering Ulu Selatan	26,315234	26,707348	24,456569	23,664964	25,211902
339		Kota Bandar Lampung	26,405641	27,360085	24,645061	26,422692	26,843563
340		Kota Metro	25,038819	26,522837	24,004139	24,602290	24,278614

LAMPIRAN 3

DATA PDRB TAHUN 2007-2012

No	Kab/Kota	Ln PDRB Tahun 2007	Ln PDRB Tahun 2008	Ln PDRB Tahun 2009	Ln PDRB Tahun 2010	Ln PDRB Tahun 2011	Ln PDRB Tahun 2012
1	Kab. Aceh Barat	27,709832	27,762926	27,811675	27,860544	27,910923	27,959605
2	Kab. Aceh selatan	27,797383	27,833145	27,853364	27,894154	27,937770	27,982382
3	Kab. Bireuen	28,445943	28,500639	28,552100	28,599904	28,654551	28,709431
4	Kota Sabang	26,098544	26,139366	26,187098	26,236695	26,272342	26,314253
5	Kab. Aceh Barat Daya	27,089736	27,133441	27,176891	27,224556	27,274346	27,325854
6	Kab. Aceh Jaya	26,216327	26,256655	26,299215	26,343667	26,386226	26,427048
7	Kab. Nagan Raya	27,488305	27,523436	27,558450	27,598498	27,643937	27,693996
8	Kab. Aceh Tamiang	27,818330	27,842901	27,866093	27,885663	27,931126	27,985193
9	Kab. Bener Meriah	27,215506	27,254143	27,298342	27,351307	27,401608	27,453090
10	Kab. Pidie Jaya	27,047625	27,099993	27,151371	27,203310	27,248295	27,298342
11	Kab. Asahan	29,172394	29,221276	29,266906	29,315567	29,367972	29,422114
12	Kab. Dairi	28,209879	28,254282	28,300388	28,349349	28,400666	28,453441
13	Kab. Langkat	29,452016	29,501592	29,550734	29,606629	29,662716	29,717811
14	Kab. Mandailing Natal	28,153380	28,216026	28,277601	28,340042	28,402055	28,464365
15	Kab. Simalungun	29,204417	29,250607	29,298728	29,348596	29,405126	29,463923
16	Kab. Tapanuli Selatan	28,072497	28,120827	28,160472	28,209879	28,261229	28,312602
17	Kab. Tapanuli Utara	27,951654	28,007401	28,055635	28,109737	28,164000	28,221582
18	Kab. Toba Samosir	28,037819	28,092236	28,143845	28,197471	28,248906	28,302434

No	Kab/Kota	Ln PDRB Tahun 2007	Ln PDRB Tahun 2008	Ln PDRB Tahun 2009	Ln PDRB Tahun 2010	Ln PDRB Tahun 2011	Ln PDRB Tahun 2012
19	Kota Binjai	28,164586	28,218252	28,275503	28,334614	28,395558	28,456949
20	Kota Medan	31,010416	31,077001	31,140475	31,209583	31,283651	31,357172
21	Kota Pematang Siantar	28,178564	28,234244	28,286466	28,343481	28,402055	28,457387
22	Kota Sibolga	27,159416	27,215506	27,271485	27,329916	27,379992	27,431350
23	Kota Tanjung Balai	27,837222	27,876317	27,918453	27,965348	28,012876	28,061504
24	Kota Tebing Tinggi	27,608776	27,667353	27,725422	27,784600	27,848549	27,913942
25	Kota Padang Sidempuan	27,392764	27,451894	27,508853	27,564881	27,621980	27,682664
26	Kab. Humbang Hasundutan	27,475536	27,532305	27,584977	27,637997	27,694934	27,753239
27	Kab. Samosir	27,534510	27,583930	27,633019	27,687401	27,746134	27,804974
28	Kab. Lima Puluh Kota	28,506073	28,565545	28,618702	28,676936	28,738263	28,800092
29	Kab. Agam	28,596483	28,658137	28,706024	28,761132	28,818865	28,884926
30	Kab. Kepulauan Mentawai	26,867451	26,911530	26,955714	27,003662	27,052987	27,103388
31	Kab. Padang Pariaman	28,543304	28,603692	28,642258	28,692624	28,746163	28,804741
32	Kab. Sawahlunto Sijunjung	27,766426	27,817501	27,871612	27,925927	27,981678	28,041142
33	Kab. Solok	28,225452	28,286986	28,347396	28,406209	28,465668	28,526292
34	Kab. Tanah Datar	28,420387	28,477747	28,534834	28,591903	28,648785	28,704316
35	Kota Bukit Tinggi	27,482521	27,546552	27,600562	27,659609	27,719947	27,782024
36	Kota Padang Panjang	26,584052	26,644844	26,707202	26,765899	26,825824	26,886581
37	kota Payakumbuh	27,313567	27,374838	27,431350	27,494055	27,559525	27,625003
38	Kota Sawahlunto	26,852316	26,884473	26,927824	26,977095	27,033184	27,091453

No	Kab/Kota	Ln PDRB Tahun 2007	Ln PDRB Tahun 2008	Ln PDRB Tahun 2009	Ln PDRB Tahun 2010	Ln PDRB Tahun 2011	Ln PDRB Tahun 2012
39	Kota Solok	26,821340	26,884473	26,933866	26,990466	27,049415	27,111827
40	Kota Pariaman	27,156206	27,209427	27,254143	27,305291	27,363142	27,421534
41	Kab. Pelalawan	28,613474	28,680793	28,758545	28,823731	28,889766	28,957565
42	Kota Pekanbaru	29,576503	29,663109	29,747638	29,833565	29,924868	30,025365
43	Kab. Batanghari	27,637997	27,697745	27,747915	27,806654	27,883335	27,952380
44	Kab. Bungo	27,652783	27,757654	27,819987	27,884888	27,958885	28,031809
45	Kab. Merangin	27,584977	27,642950	27,724511	27,799920	27,867673	27,930385
46	Kab. Muaro Jambi	27,637997	27,688346	27,742562	27,847744	27,916952	27,990093
47	Kab. Sarolangun	27,608776	27,684562	27,761172	27,839660	27,923691	27,999130
48	Kab. Tebo	27,370954	27,430128	27,479035	27,536710	27,601592	27,665423
49	Kota Jambi	28,676936	28,736278	28,798848	28,816728	28,886922	28,958096
50	Kab. Musi Banyuasin	29,986294	30,013156	30,040755	30,070407	30,103771	30,143056
51	Kab. Musi Rawas	28,771415	28,827667	28,875176	28,925474	28,982465	29,036137
52	Kab. Muara Enim	29,618895	29,674058	29,720289	29,770970	29,822675	29,875447
53	Kab. Ogan Komering Ilir	28,670591	28,722273	28,771735	28,829479	28,896277	28,959951
54	Kota Pagar Alam	27,011124	27,047625	27,082840	27,136725	27,189411	27,249761
55	Kota Lubuk Linggau	27,569146	27,630021	27,691175	27,752353	27,815008	27,877881
56	Kab. Banyuasin	29,025532	29,077705	29,131090	29,190218	29,249815	29,310172
57	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	28,325168	28,375337	28,426725	28,483733	28,547312	28,616465
58	Kab. Ogan komering Ulu Selatan	27,706129	27,759414	27,818330	27,877100	27,942908	28,006027
59	Kab. Empat Lawang	27,430128	27,480198	27,532305	27,588114	27,647878	27,707056

No	Kab/Kota	Ln PDRB Tahun 2007	Ln PDRB Tahun 2008	Ln PDRB Tahun 2009	Ln PDRB Tahun 2010	Ln PDRB Tahun 2011	Ln PDRB Tahun 2012
60	Kab. Bengkulu Selatan	26,919710	26,967433	27,014835	27,068902	27,131795	27,194065
61	Kota Bengkulu	28,222689	28,271822	28,325168	28,387143	28,452122	28,517677
62	Kab. Kaur	26,089242	26,143801	26,182851	26,224524	26,272342	26,325385
63	Kab. Mukomuko	26,913581	26,979016	27,020375	27,072405	27,130146	27,194065
64	Kab. Lampung Barat	27,882558	27,932606	27,987296	28,042468	28,087179	28,151599
65	Kab. Lampung Utara	28,680093	28,735615	28,796980	28,845340	28,902746	28,961274
66	Kab. Way Kanan	27,829872	27,874751	27,923691	27,973901	28,027109	28,082097
67	Kota Bandar Lampung	29,322223	29,389224	29,447636	29,509111	29,572349	29,635604
68	Kota Metro	26,894966	26,945842	26,998028	27,056545	27,118527	27,175315

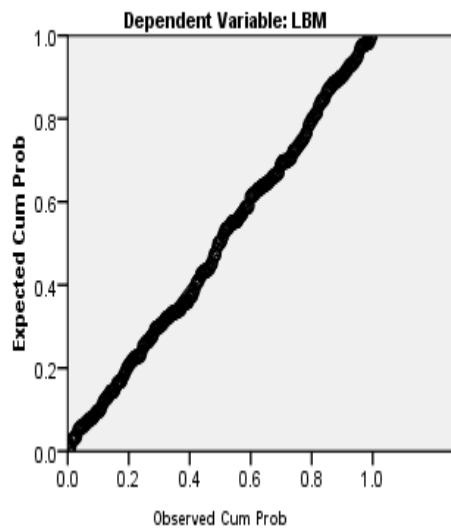
LAMPIRAN 4
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LnBM	340	23.72	27.68	255.095	.58148
LnDAU	340	24.41	31.27	265.276	.47737
LnDAK	340	22.25	27.05	243.704	.46998
LnPAD	340	21.08	27.77	239.034	.83524
LnPE	340	22.92	28.71	251.295	.99544
Valid N (listwise)	340				

LAMPIRAN 5
Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		340
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.45750048
	Absolute	
Most Extreme Differences	Positive	.036
	Negative	-.019
Kolmogorov-Smirnov Z		.672
Asymp. Sig. (2-tailed)		.757

a. Test distribution is Normal.

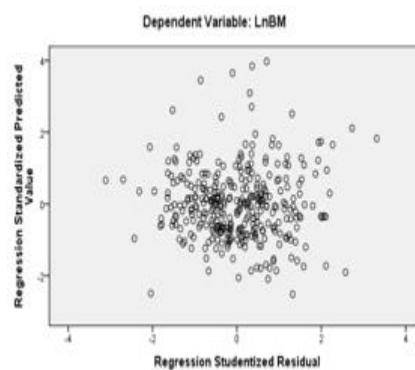
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 LnDAU	.631	1.585
LnDAK	.766	1.306
LnPAD	.526	1.901
LnPE	.466	2.145

a. Dependent Variable: LnBM

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.617 ^a	.381	.374	.46022	1.275

a. Predictors: (Constant), LnPE, LnDAK, LnDAU, LnPAD

b. Dependent Variable: LnBM

LAMPIRAN 6

Analisis Regresi Berganda

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LnPE, LnDAK, LnDAU, LnPAD ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: LnBM

LAMPIRAN 7

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.582	1.686		8.055	.000
LnDAU	-.216	.066	-.177	-3.275	.001
LnDAK	.316	.061	.256	5.204	.000
LnPAD	.127	.041	.182	3.074	.002
LnPE	.275	.037	.471	7.481	.000

a. Dependent Variable:
LnBM

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	43.668	4	10.917	51.542	.000 ^a
Residual	70.955	335	.212		
Total	114.623	339			

a. Predictors: (Constant), LnPE, LnDAK, LnDAU, LnPAD

b. Dependent Variable: LnBM

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.617 ^a	.381	.374	.46022

a. Predictors: (Constant), LnPE, LnDAK, LnDAU, LnPAD